

PERJANJIAN LAUSANNE 1923

(Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang Kemerdekaan)



SKRIPSI

Oleh:

WAHYU NIRWANTO

NIM: K 4405039

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

PERJANJIAN LAUSANNE 1923
(Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang Kemerdekaan)

Oleh :
WAHYU NIRWANTO
NIM: K4405039

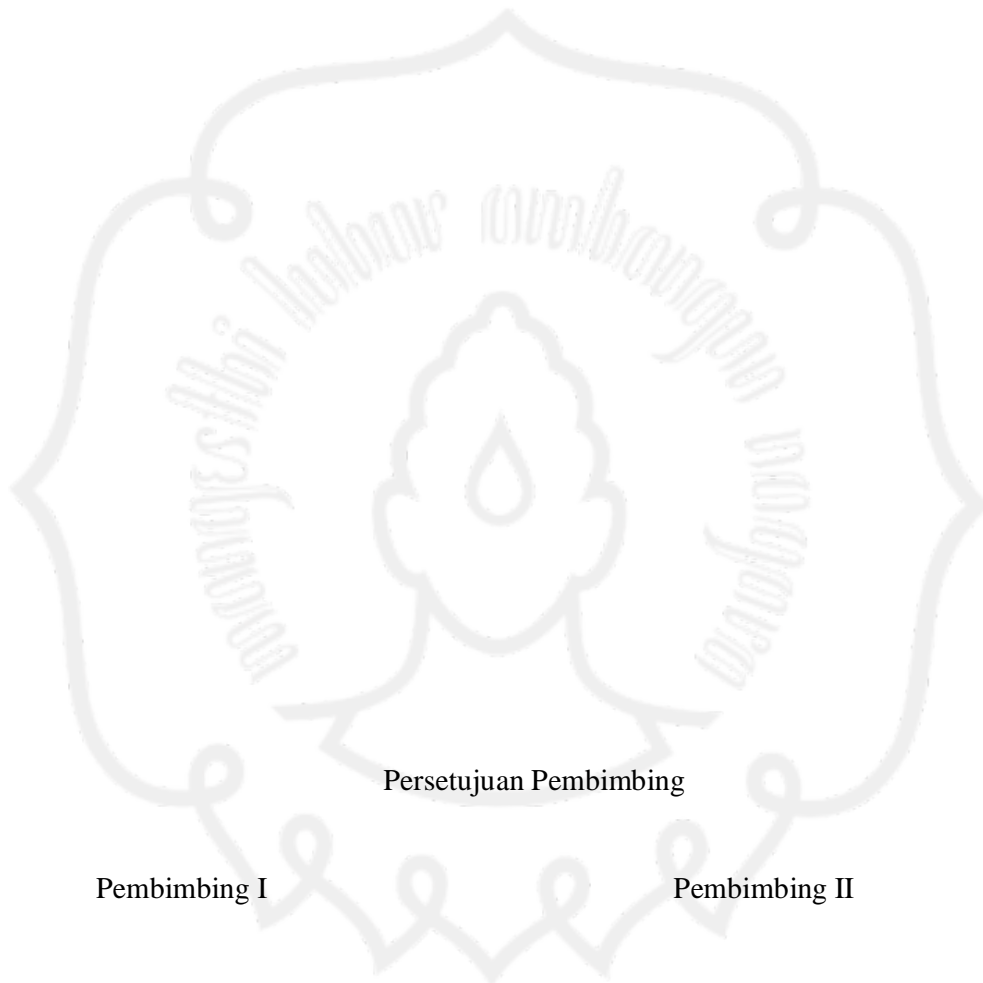
Skripsi

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan P. IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hermanu Joebagio, M. Pd
NIP. 19560303 198603 1 001

Drs. Herimanto, M.Pd, M.Si
NIP. 19661029 199112 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan P. IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua	: Dra. Sri Wahyuni, M.Pd
Sekretaris	: Dra. Sariyatun, M.Pd, M.Hum
Anggota I	: Drs. Hermanu Joebagio, M. Pd
Anggota II	: Drs. Herimanto, M.Pd, M.Si

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd

NIP. 19600727 198702 1 001

ABSTRAK

Wahyu Nirwanto. K4405039. PERJANJIAN LAUSANNE 1923 (PENGAKUAN KEDAULATAN REPUBLIK TURKI PASCA PERANG KEMERDEKAAN). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, April 2010.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Latar belakang Perjanjian Lausanne tahun 1923. (2) Proses pelaksanaan Perjanjian Lausanne tahun 1923, (3) Dampak yang ditimbulkan dari Perjanjian Lausanne tahun 1923 bagi Turki.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis, yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam mengolah suatu data sejarah. Prosedur penelitian dilakukan dengan empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peristiwa yang melatarbelakangi Perjanjian Lausanne 1923 diawali dengan Perang Dunia I. Akhir Perang Dunia I diselesaikan dengan Perjanjian Sevres 1920 golongan nasionalis Turki tidak menyetujui hasil dari Perjanjian Sevres karena merugikan Turki. Reaksi Sekutu terhadap penolakan itu menyebabkan Perang kemerdekaan Turki tahun 1921 hingga tahun 1922. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sekutu dan Turki melakukan perundingan di kota Lausanne. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Lausanne tahun 1923. (2) Perjanjian Lausanne telah mewujudkan tujuan dari Pakta Nasional. Turki telah memperoleh kembali wilayah-wilayah yang diinginkannya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, negara nasional Turki mendapat pengakuan internasional. (3) Perjanjian Lausanne berdampak luas bagi bangsa Turki. Perjanjian Lausanne telah membuat Republik Turki berdaulat. Setelah perjanjian itu, Republik Turki memproklamasikan kemerdekaannya dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Di bawah pemerintahan Kemal, dilakukan pembaruan-pembaruan di Turki. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pemerintahan Kemal antara lain sekularisme, sistem ekonomi etatisme, dan penghapusan Kekhalifahan Turki Utsmani.

ABSTRACT

Wahyu Nirwanto. K4405039. TREATY OF LAUSANNE 1923 (INDEPENDENT ACKNOWLEDGEMENT OF TURKEY REPUBLIC AFTER INDEPENDENT WAR). Paper, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2010.

The aim of this research is to describe: (1) The background of Treaty of Lausanne 1923. (2) The process of Treaty of Lausanne 1923. (3) The effect of Treaty of Lausanne 1923 effect for Turkey.

This research use history methods. The research data sources is books that relevant with this reasearch. The data gathering in this research use library learning. The technique of data analysis used in this research is historical analysis, it is give a priority to sharp the process of history data. The procedures of this reasearch was done with four steps, that is heuristic, criticism, interpretation, dan historiography.

Based on this research, it concluded that: (1) Event that become the background of Treaty of Lausanne 1923 began by World War I. The last of World War I finished by Treaty of Sevres 1920. Turkish nationalist group are not agree the result of this Treaty. Entente reaction towards that rejection caused the Turkish Independent War 1921 until 1922. To finished that problem, Entente and Turkish arrange meeting to confrence at Lausanne city that next produced Treaty of Lausanne 1923. (2) Treaty of Lausanne already realized Turkish National Pact direction. Turkey already to get back much area that they want. After Treaty of Lausanne legalized, Turkey national country get international acknowledgement. (3) Treaty of Lausanne have big effect for Turkey nation. Treaty of Lausanne already made Turkey Republic become independent. After taht Treaty, Turkey Republic proclaimed they independent with Mustafa Kemal as a president. At Kemal government period, reformation executed at Turkey. Reformation that executed Kemal government that sekularism, etatism economic system, and Ottoman Empire wipe off.

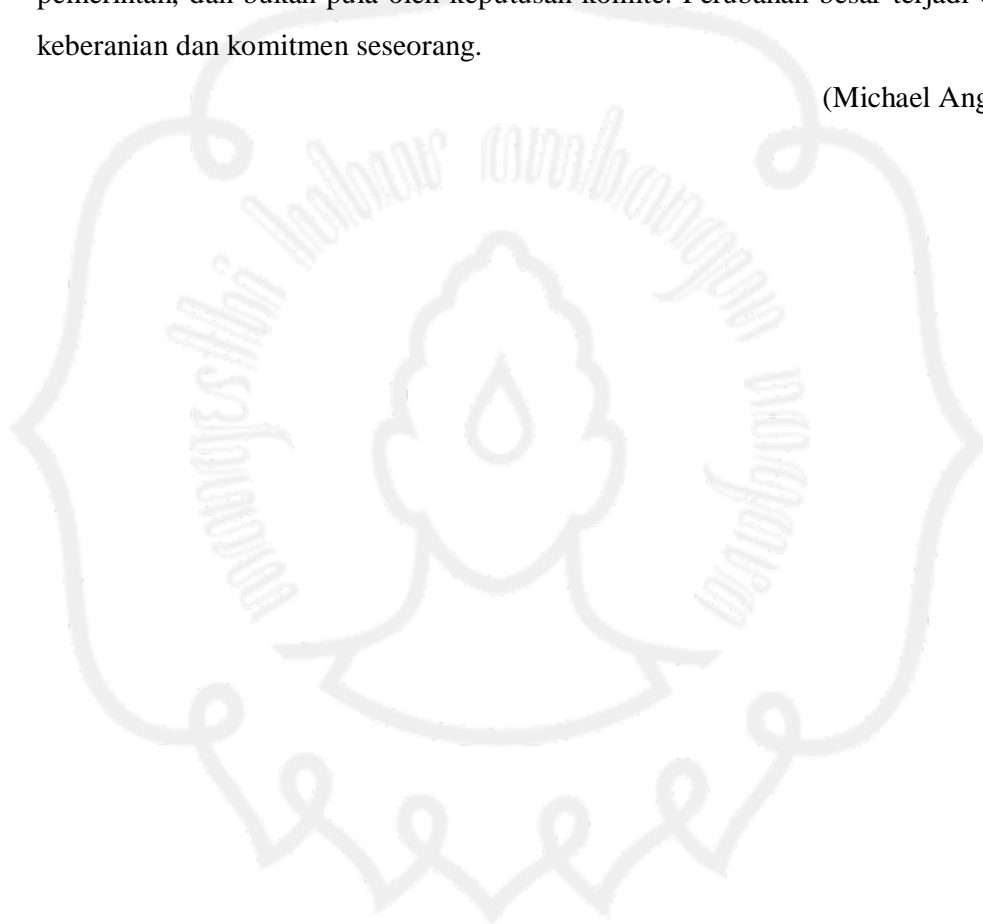
MOTTO

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...

(Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Semua perubahan besar sepanjang sejarah tidak terjadi karena bangsa, senjata, pemerintah, dan bukan pula oleh keputusan komite. Perubahan besar terjadi oleh keberanian dan komitmen seseorang.

(Michael Angier)



PERSEMBAHAN



Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu
2. Adik-adikku
3. Kawan-kawan P. Sejarah UNS 2005
4. Mereka yang telah membantuku
5. Almamater
6. Semua orang yang mengenalku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan

Hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS yang telah menyetujui atas permohonan skripsi ini.
3. Ketua Program Pendidikan Sejarah FKIP UNS yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Hermanu Joebagio, M. Pd selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Herimanto, M. Pd, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi. Penulis memohon pula maaf apabila terdapat tindakan dan perkataan penulis yang kurang berkenaan.

Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada khususnya dan perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.

Surakarta, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Imperialisme	6
2. Nasionalisme	10
3. Kedaulatan Negara	14
B. Kerangka Berpikir	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
A. Tempat dan Waktu Penelitian	19
B. Metode Penelitian	19
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	24
F. Prosedur Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	28

A. Latar Belakang Perjanjian Lausanne 1923	28
1. Perang Dunia I	28
2. Perjanjian Sevres 1920	33
3. Gerakan Nasionalis Turki	37
4. Perang Kemerdekaan Turki 1921-1922	40
B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Lausanne 1923	43
1. Tahap Perundingan	43
2. Hasil Perundingan	45
C. Dampak Perjanjian Lausanne 1923	47
1. Dampak Politik	47
2. Dampak Sosial Budaya	52
3. Dampak Ekonomi	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi	58
C. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imperialisme adalah setiap usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menguasai daerah atau bangsa lain. Imperialisme berawal dari bangsa Mesir, Babylonia, dan Assyria yang merupakan hasil penaklukan bangsa-bangsa sekitarnya. Kemudian lahir Imperium Romawi yang pada masa puncaknya, daerah kekuasaannya meliputi seluruh Eropa Barat, Asia Barat, Mesir, dan seluruh Afrika Utara. Pada Abad ke-8 dan ke-9 bangsa-bangsa Arab menaklukkan Afrika Utara, Spanyol, Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Asia Barat. Kemudian bangsa Mongol menguasai dunia pada abad ke-13 dan ke-14. Adanya penemuan alat navigasi, kapal layar yang kuat, serta kemajuan pada bidang ilmu bumi pada pertengahan abad ke-15 memungkinkan diadakannya pelayaran jarak jauh. Pada masa itu ditemukan benua Amerika dan diketahuinya jalan laut menuju Afrika dan Asia. Portugal dan Spanyol yang memelopori pembentukan koloni-koloni jajahan di seberang lautan. Kemudian disusul oleh bangsa-bangsa barat yang lain, seperti Belanda, Inggris, dan Prancis yang menjadi pelopor imperialisme modern. Imperialisme modern muncul pada abad ke 19 akibat dari revolusi industri. Selama periode tersebut, imperium yang sangat luas terbentuk dan banyak bangsa kulit berwarna kehilangan kemerdekaannya. Inggris dan Perancis merupakan kekuatan imperialis aktif. Selain itu ada Italia dan Jerman yang juga memperoleh daerah jajahan (Leo Agung S., 2002: 18). Perebutan-perebutan wilayah antara negara-negara imperialis tersebut mencapai puncaknya pada Perang Dunia I.

Salah satu wilayah yang diperebutkan oleh negara-negara imperialis adalah wilayah Turki. Turki yang pada waktu itu di bawah kekuasaan Dinasti Utsmani bersekutu dengan Jerman pada Perang Dunia I. Lawan mereka adalah Inggris, Perancis, dan Rusia yang tergabung dalam *Triple Entente*. Perlawanan Turki terhadap *Entente* disebabkan karena konflik pada saat perang Balkan. Turki

kehilangan banyak wilayah di Eropa pada saat Perang Balkan (Siti Maryam, 2002: 153).

Perang Dunia Pertama meletus pada tanggal 2 Agustus 1914 di Eropa. Turki terlibat dalam perang tersebut dengan tujuan untuk bebas dari Penjajahan Barat, menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang melepaskan diri seperti Mesir dan Siprus, memerdekakan wilayah Kaukasus dan Turkestan dari Rusia dan menggabungkannya ke dalam Kerajaan dalam bentuk federasi, serta menegakkan kembali wewenang Khalifah di seluruh dunia Islam (Siti Maryam, 2002: 154).

Dalam Perang Dunia I, penyerangan yang dilakukan *Entente* membuat Turki menjadi semakin terdesak. Perlawanan Turki yang berarti terjadi di Aleppo. Angkatan Darat Turki pimpinan Mustafa Kemal Pasha menghadang gerak maju tentara Inggris. Namun, perlawanan yang gigih ini tidak mampu mengubah keadaan. Setelah menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain gencatan senjata, akhirnya Turki menyerukan gencatan senjata yang ditandatangani di Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918 (Siti Maryam, 2002: 154-155; 143-151).

Ada keinginan dari Sekutu untuk melakukan penyelesaian baru mengenai masalah Turki. Namun, perundingan yang dilakukan belum melibatkan Turki. Sepanjang tahun 1919 hingga 1920, terjadi perundingan di Paris dan San Remo yang dilakukan oleh Sekutu tanpa keterlibatan Turki. Keputusan dalam perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Sevres antara Sekutu dan Pemerintah Utsmaniah (George Lenczowski, 1993: 66-67). Sementara di Turki muncul perkembangan yang akan dapat membangkitkan nasionalisme Turki. Sebuah kongres delegasi propinsi-propinsi timur diselenggarakan di Erzerum dari tanggal 23 Juli sampai 19 Agustus 1919 yang menjadi titik tolak perlawanan bangsa Turki menghadapi Sekutu untuk memperoleh kemerdekaan dan juga akan menolak Perjanjian Sevres. Kongres ini menghasilkan resolusi yang antara lain menyatakan tuntutan atas kemerdekaan dan terciptanya persatuan bagi rakyat Turki yang bersatu dalam agama, ras, dan tujuan. Resolusi tersebut dikukuhkan oleh kongres di Sivas pada tanggal 4 September 1919 yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari seluruh kerajaan 1918. Resolusi yang sudah diformulasikan dalam bentuk program enam pasal yang dinamakan Pakta Nasional diajukan ke

Parlemen di Istanbul tanggal 28 Januari 1920, kemudian disahkan oleh Parlemen pada bulan Februari 1920. (Siti Maryam, 2002: 156).

Perjanjian Sevres ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1920. Perjanjian ini mengesahkan Kerajaan Utsmani hanya sebagai sebuah negara kecil di Asia Kecil utara dengan Istanbul sebagai ibukotanya. Thrace Timur dan daerah sekitar Izmir diberikan kepada Yunani, sedangkan selat Bosphorus dan Dardanela diinternasionalisasikan. Republik Armenia merdeka didirikan di Anatolia Timur. Prancis mendirikan mandat di Syria dan Libanon dan memiliki pengaruh di Anatolia Timur. Inggris mendirikan mandat di Palestina, Syria selatan (Transjordan), dan Mesopotamia (Irak), termasuk propinsi Mosul. Italia memperoleh bagian Barat daya Asia Kecil sebagai ruang pengaruhnya. Kurdistan sebelah utara propinsi Mosul diserahkan kepada kerajaan Utsmani, tetapi memperoleh otonomi dan hak untuk memohon kemerdekaan kepada Liga Bangsa-bangsa dalam setahun (Erik J. Zürcher, 2003: 187). Di samping itu, kedaulatan Turki juga dibatasi. Angkatan Perang Turki dibatasi sampai 50.000. Dilakukan pula pembatasan terhadap persenjataan. Turki setuju untuk menerima pengawasan ketat komisi keuangan yang mewakili Inggris, Prancis, dan Italia. Komisi ini menjalankan kekuasaan eksekutif diantaranya dengan wewenang luas memeriksa utang negara, anggaran negara, maupun peredaran uang (George Lenczowski, 1993: 68-69). Perjanjian Sevres menimbulkan kemarahan rakyat di seluruh Turki. Perjanjian ini sangat menghina bangsa Turki dan menurunkan statusnya menjadi negara kecil yang wilayah dan kedaulatannya dibatasi (George Lenczowski, 1993: 68-69).

Mustafa Kemal menyatakan bahwa perjanjian Sevres bukanlah sebuah perjanjian perdamaian, tetapi merupakan sesuatu yang justru akan melanjutkan perang. Inggris dan Prancis tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghancurkan kekuatan tentara Mustafa Kemal di Anatolia. Inggris dan Prancis menyatakan tidak mudah dan tidak kuat dalam menghadapi Mustafa Kemal. Justru Yunani yang menyatakan kesediaannya untuk menghancurkan Turki. Atas dukungan Inggris dan Prancis, 100.000 tentara Yunani mendarat di pantai Azmir

menghadapkan serangan ke wilayah Turki (Hamka, 1975: 328). Peristiwa tersebut mengawali terjadinya Perang Kemerdekaan Turki pada tahun 1921 hingga 1922.

Mustafa Kemal berhasil menahan serangan Yunani dan berhasil memaksa Eropa menyerahkan kekuasaan atas wilayah Azmir dan Anatolia. Yunani kembali menyerang Utsmani pada Agustus hingga pertengahan September 1921. Mustafa Kemal berhasil mematahkan serangan ini (Ali K., 2003: 563). Kemudian dilaksanakan perundingan-perundingan antara Turki dan Entente. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya terwujud Perjanjian Lausanne yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, negara nasional Turki mendapat pengakuan internasional. Perjanjian Lausanne menimbulkan dampak terhadap perkembangan negara Turki selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam skripsi berjudul “PERJANJIAN LAUSANNE 1923 (Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang Kemerdekaan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dilaksanakannya Perjanjian Lausanne tahun 1923?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Perjanjian Lausanne tahun 1923?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Perjanjian Lausanne 1923 bagi Turki?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami latar belakang Perjanjian Lausanne tahun 1923.

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Perjanjian Lausanne tahun 1923.
3. Untuk memahami dampak yang ditimbulkan dari Perjanjian Lausanne tahun 1923 bagi Turki.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dilihat dari besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian tersebut. Berdasarkan hal itu, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang Perjanjian Lausanne tahun 1923.
3. Dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Imperialisme

Imperialisme berasal dari kata *imperium* (latin) yang berarti memerintah (Leo Agung S., 2002: 21). Kemudian arti itu berubah menjadi hak memerintah. Arti inipun mengalami perubahan lagi menjadi daerah kekuasaan memerintah itu dilakukan. Oleh karena itu, *imperium* selalu dihubungkan dengan kekuasaan dunia. Menurut Arkanda (“Sejarah Penjajahan di Indonesia”, [Http://arkandas.wordpress.com](http://arkandas.wordpress.com), 1 Juli 2009), imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan *imperium* atau kekaisaran.

Berdasarkan sejarah, imperialisme digolongkan menjadi dua, hal itu berpijak pada usaha penaklukan yang dilakukan oleh bangsa barat (Leo Agung S., 2002: 22), yaitu:

a. Imperialisme Kuno.

Ciri imperialisme kuno adalah 3 G, yakni *Gospel* (penyebaran agama), *Gold* (mencari kekayaan), dan *Glory* (mencari kejayaan). Contoh negara-negara yang melakukan imperialisme kuno adalah bangsa Portugis dan Spanyol.

b. Imperialisme Modern.

Ciri imperialisme modern adalah adanya industri. Imperialisme modern ini muncul setelah Revolusi Industri. Demi kelangsungan industrialisasi, perlu daerah pasaran, bahan mentah, dan penanaman modal yang surplus. Itulah sebabnya negara-negara imperialis berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah jajahan yang akan dijadikan sumber bahan mentah, pasaran hasil industri, penanaman modal, dan mendapatkan tenaga buruh yang murah. Contoh negara-negara yang melakukan imperialisme modern adalah Inggris dan Perancis.

Imperialisme Kuno berawal dari bangsa Mesir, Babylonia, dan Assyria yang merupakan hasil penaklukan bangsa-bangsa sekitarnya. Kemudian lahir Imperium Romawi dan bangsa Mongol. Adanya penemuan alat navigasi, kapal layar yang kuat, serta kemajuan pada bidang ilmu bumi pada pertengahan abad ke-15 memungkinkan diadakannya pelayaran jarak jauh. Pada masa itu ditemukan benua Amerika dan diketahuinya jalan laut menuju Afrika dan Asia. Portugal dan Spanyol yang memelopori pembentukan koloni-koloni jajahan di seberang lautan. Imperialisme Portugal dan Spanyol merupakan imperialisme kuno. Kemudian disusul oleh bangsa-bangsa barat yang lain, seperti Belanda, Inggris, dan Prancis yang menjadi pelopor imperialisme modern. Imperialisme modern muncul pada abad ke 19 akibat dari revolusi industri. Selama periode tersebut, imperium yang sangat luas terbentuk dan banyak bangsa kulit berwarna kehilangan kemerdekaannya. Inggris dan Perancis merupakan kekuatan imperialis yang aktif. Selain itu ada Italia dan Jerman yang juga memperoleh daerah jajahan (Leo Agung S., 2002: 19).

Menurut T. Parker Moon yang dikutip oleh Leo Agung S. (2002: 21), imperialisme adalah nafsu bangsa untuk mendapatkan koloni-koloni karena dorongan idealisme dan avonturisme. Sedangkan J. Schumpeter (Leo Agung S., 2002: 21) mengemukakan bahwa imperialisme adalah kecenderungan dari negara untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan.

Menurut Suhartaya Harjasatoto (1985: 11) imperialisme adalah nafsu untuk menguasai sistem penguasaan wilayah bangsa lain. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil dan Julianto (1986: 8) imperialisme adalah nafsu bangsa untuk menaklukan bangsa lain dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya dengan jalan diplomasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan.

Menurut J.A. Hobson dalam Leo Agung S., (2002: 22) menyatakan bahwa imperialisme modern adalah akibat dari sistem perekonomian yang buruk. Barang yang melimpah di dalam negeri mendorong para produsen untuk mencari daerah pasaran dan menimbulkan imperialisme. Sedangkan menurut Ir. Soekarno dalam Leo Agung S., (2002: 22) menyatakan bahwa imperialisme modern adalah

suatu keharusan yang ditentukan oleh tinggi rendahnya ekonomi pergaulan hidup. Imperialisme modern bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri atau bangsa lain, tetapi imperialisme dapat juga hanya nafsu atau sistem yang memengaruhi ekonomi negara dan bangsa lain. Baik J.A. Hobson maupun Ir. Soekarno sama-sama menyoroti imperialisme modern dari segi ekonomi. Sistem ekonomi yang menyebabkan munculnya imperialisme modern adalah sistem ekonomi kapitalis.

Dahlan Nasution (1984: 39-41) mengemukakan bahwa ada tiga tujuan imperialisme modern, yaitu: (a) Kekuasaan atas dunia (*World Empire*), yang disebut imperialisme tidak terbatas. (b) Kekuasaan atas benua (*Continental Empire*), tujuan ini diartikan dengan pembatasan kekuasaan dalam satu benua. (c) Keunggulan lokal (*Local Propenderence*) atau imperialisme lokal.

Ada empat bentuk dalam menjalankan imperialisme (Leo Agung S., 2002: 23), yaitu:

a. Imperialisme Politik.

Bentuk imperialisme ini bertujuan untuk memperoleh pengawasan politik terhadap bangsa atau negara dengan cara pembentukan pemerintahan kolonial. Motif utamanya adalah untuk memperoleh prestise dengan cara pembentukan imperialisme atau menutup ketidakpuasan dalam negeri dengan cara melakukan politik di luar negeri.

b. Imperialisme Militer.

Bertujuan untuk memperoleh daerah strategis. Daerah–daerah koloni dapat menghasilkan tenaga manusia dan dapat juga memegang peranan penting dalam menjamin kepentingan negara yang berkuasa.

c. Imperialisme Kebudayaan.

Imperialisme kebudayaan berusaha untuk mengadakan penguasaan atau kontrol atas ide atau pemikiran bangsa lain. Biasanya jenis ini menyertai imperialisme politik, ekonomi, dan militer.

d. Imperialisme ekonomi.

Tujuannya adalah penguasaan daerah yang terbelakang untuk penanaman modal yang berlebihan, pengambilan bahan mentah, dan pasaran hasil industri.

Sebab-sebab Imperialisme antara lain (Soebantardjo, “Sari Sejarah jilid I: Asia-Afrika”, [Http://www.wikipedia.org/wiki/imperialisme](http://www.wikipedia.org/wiki/imperialisme), 1 Juli 2009) :

- a. Keinginan untuk menjadi jaya, menjadi bangsa yang terbesar di seluruh dunia (*ambition, eertzucht*).

Tiap bangsa ingin menjadi jaya. Jika bangsa tidak dapat mengendalikan keinginan ini, mudah bangsa itu menjadi bangsa imperialis. Karena itu dapat dikatakan, bahwa tiap bangsa itu mengandung benih imperialisme.

- b. Perasaan se bangsa, bahwa bangsa itu adalah bangsa istimewa di dunia ini (*racial superiority*).

Tiap bangsa mempunyai harga diri. Jika harga diri ini menebal, mudah menjadi kecongkakan untuk kemudian menimbulkan anggapan, bahwa merekalah bangsa teristimewa di dunia ini, dan berhak menguasai, atau mengatur atau memimpin bangsa-bangsa lainnya.

- c. Hasrat untuk menyebarkan agama atau ideologi dapat menimbulkan imperialisme.

Tujuannya bukan imperialisme, tetapi agama atau ideologi. Jika penyebaran agama itu didukung oleh pemerintah negara, maka sering tujuan pertama terdesak dan merosot menjadi alasan untuk membenarkan tindakan imperialisme.

- d. Letak negara yang dianggap geografis tidak menguntungkan.

Perbatasan negara mempunyai arti yang sangat penting bagi politik negara.

- e. Sebab-sebab ekonomi.

Sebab-sebab ekonomi inilah yang merupakan sebab yang terpenting dari timbulnya imperialisme, terutama imperialisme modern. Sebab-sebab ini antara lain karena keinginan untuk mendapatkan kekayaan dari negara, keinginan untuk ikut dalam perdagangan dunia, ingin menguasai perdagangan, dan keinginan untuk menjamin suburnya industri.

2. Nasionalisme

a. Pengertian Nasionalisme

Hans Kohn (1984: 11-12) mengatakan bahwa yang dimaksud nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik dan merupakan sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.

Miriam Budiardjo (2004: 44) menyatakan nasionalisme merupakan perasaan subyektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa. Cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara atau *nation*. Sedangkan menurut L. Stoddard (1966: 137) bahwa nasionalisme adalah kepercayaan, yang dianut oleh sejumlah besar manusia perorangan sehingga mereka membentuk "kebangsaan". Pada tingkat terakhir, nasionalisme adalah se di atas segalanya yang menjelmakan dirinya dalam sintese yang baru dan lebih tinggi.

Isjwara (1982: 126-127) mendefinisikan bahwa nasionalisme adalah rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan atas kesabaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah. Sedangkan menurut Anthony D. Smith (2003: 11), nasionalisme sebagai gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk bangsa yang aktual atau negara yang potensial.

Menurut Boyd C. Shafer yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo (2006: 41) nasionalisme adalah: (1) rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau sejarah budaya bersama; (2) keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa; (3) dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri; (4) doktrin yang menyatakan bahwa bangsa sendirilah yang harus dominan di antara bangsa-bangsa lain.

b. Faktor Penyebab Munculnya Nasionalisme

Menurut Boyd C. Shafer yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo (2006: 41), nasionalisme mengandung aspek subyektif dan aspek obyektif. Nasionalisme dapat muncul dari rasa cinta tanah air dan keinginan untuk merdeka serta dogma dan doktrin yang diajarkan oleh seseorang atau lembaga tertentu. Nasionalisme juga mengandung aspek obyektif, yaitu aspek obyektif yang ikut berperan dalam menimbulkan nasionalisme, yang dirasakan sama oleh seluruh bangsa seperti kondisi politik (penjajahan), kondisi kultural (bahasa dan sejarah budaya), serta kondisi fisik (tanah air dan ras). Baik unsur subyektif maupun obyektif tersebut akan memberi warna khusus terhadap nasionalisme bangsa.

Berdasarkan kondisi politik, Nasionalisme bangsa Turki muncul karena penjajahan bangsa Eropa. Sekalipun mempunyai kesultanan sebagai pemimpin atau Khalifah, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi bangsa penjajah dan justru bekerjasama. Wilayah-wilayah Turki sering terampas sehingga wilayah Turki menjadi menyempit. Padahal berdasarkan kondisi kultural, wilayah-wilayah yang terampas terutama di bagian Eropa masih merupakan bagian dari Turki. Berdasarkan ras dan tempat kelahiran penduduk pun masih mempunyai integritas dengan Turki. Oleh karena itu muncul nasionalisme Turki yang dipimpin oleh Musthafa Kemal Pasha yang menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Turki.

Dalam kenyataannya setiap bangsa yang mempunyai rasa kebangsaan akan memelihara nilai-nilai kepribadiannya, nilai-nilai sejarahnya, agamanya, ideologinya dan berjuang memperbaiki nasib. Dengan demikian setiap bangsa mempunyai kepentingan yang berlainan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Hertz yang dikutip oleh Djokosutono (1958: 9) bahwa ada empat unsur nasionalisme yaitu (1) hasrat untuk mencapai kesatuan; (2) hasrat untuk mencapai kemerdekaan; (3) hasrat untuk mencapai keadilan; (4) hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Menurut Sutarjo Adisusilo (2006: 1) unsur yang sama dalam nasionalisme dari dulu sampai sekarang adalah memelihara, melestarikan dan memajukan identitas, integritas serta ketangguhan bangsa tersebut.

Perasaan sangat mendalam akan ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di

daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda. Tetapi baru pada akhir abad ke-18 Masehi nasionalisme dalam arti kata modern menjadi perasaan yang diakui secara umum (Hans Kohn, 1984: 1). Lahirnya paham nasionalisme ini diikuti dengan terbentuknya negara-negara kebangsaan. Pada mulanya terbentuknya negara kebangsaan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor obyektif seperti persamaan keturunan, persamaan bahasa, kesatuan politik, dan tradisi atau juga karena persamaan agama. Kebangsaan yang dibentuk atas dasar paham nasionalisme lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan (Leo Agung S., 2002: 32).

Nasionalisme muncul di berbagai belahan dunia. Namun, faktor penyebab timbulnya nasionalisme di setiap benua berbeda. Kemunculan nasionalisme Eropa disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) Munculnya nasionalisme Eropa didahului dengan lahirnya liberalisme dan kapitalisme. Lahirnya liberalisme dan kapitalisme karena pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Dengan demikian timbulnya nasionalisme di Eropa karena pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis (Leo Agung S., 2002: 32). (2) Nasionalisme juga disebabkan gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Gerakan politik ini juga dimaksudkan untuk membina masyarakat sipil yang liberal dan rasional (Cahyo Budi Utomo, 1995: 18).

Munculnya nasionalisme Asia Afrika disebabkan oleh beberapa faktor (Leo Agung S., 2002: 32-33), antara lain:

1) Kenangan kejayaan masa lampau

Sebelum kedatangan imperialisme barat, pada umumnya bangsa-bangsa Asia memiliki negara kebangsaan yang berdaulat. Misalnya Indonesia, masa Sriwijaya dan Majapahit, India masa Ashoka dan sebagainya. Kejayaan itu menimbulkan kenangan akan masa lampau, sehingga mereka selalu mengadakan perlawanan terhadap penjajahan.

2) Adanya penderitaan akibat imperialisme dan kolonialisme

Adanya imperialisme mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bangsa-bangsa terjajah. Hal inilah yang menimbulkan perlawanan nasional.

3) Kemajuan di bidang politik, ekonomi dan budaya

Nasionalisme bangsa dapat juga muncul karena perkembangan beberapa aspek kehidupan, seperti:

(a) Aspek politik.

Nasionalisme bersifat menumbangkan dominasi politik imperialisme dan bertujuan menghapus pemerintah kolonial.

(b) Aspek Sosial Ekonomi.

Nasionalisme bersifat menghilangkan kesenjangan sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial dan bertujuan menghentikan eksploitasi ekonomi.

(c) Aspek Budaya.

Nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang buruk dan bertujuan menghidupkan kebudayaan yang mencerminkan harga diri bangsa setara dengan bangsa lain.

4) Timbulnya golongan terpelajar

Golongan cendekiawan muncul di mana-mana akibat perkembangan dan peningkatan pendidikan. Nasionalisme muncul dari para cendekiawan yang telah memperoleh pendidikan tinggi. Biasanya pemimpin pergerakan nasional di negara-negara Asia dan Afrika berasal dari golongan ini.

5) Kemenangan Jepang atas Rusia

Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, mendorong semangat bangsa Asia untuk bangkit menentang imperialisme barat.

Turki adalah negara yang besar dengan wilayah yang sangat luas sebelum munculnya imperialisme barat. Setelah tumbuhnya imperialisme di negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain membuat wilayah Turki sering lepas dan jatuh ke tangan imperialis barat tersebut. Keterlibatan Turki dalam konflik antar negara imperialis tersebut yang membuat Turki sering kehilangan wilayahnya. Turki kehilangan banyak wilayah karena sikap Kesultanan Turki yang lunak terhadap negara-negara imperialis tersebut. Sikap lunak itu mendorong kalangan nasionalis Turki untuk tidak mau tunduk kepada negara-negara imperialis tersebut dan mengupayakan terbentuknya

Republik Turki yang merdeka dan berdaulat penuh. Atas upaya dari kelompok nasionalis, nasionalisme tumbuh dan berkembang di seluruh Turki.

3. Kedaulatan Negara

a. Pengertian kedaulatan

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi di dalam wilayah tertentu, berarti bahwa bangsa itu merdeka dan tidak ada kekuasaan lain yang berada di atasnya (Dahlan Nasution, 1984: 155; Hans J. Morgenthau, 1991: 205). Hal ini berarti setiap bangsa mempunyai kemerdekaan untuk mengatur masalah intern maupun ekstern sesuai dengan kebijakannya sendiri tanpa adanya intervensi dari bangsa lain.

Menurut Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie (1988: 28) kedaulatan negara berarti kekuasaan yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan lainnya. Jadi, apabila negara dikatakan berdaulat, dengan sendirinya negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri utama dari negara.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari negara. Namun, kekuasaan ini mempunyai batasan. Ada dua pembatas penting dalam hal tersebut, yaitu: (1) Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara; (2) Kekuasaan itu berakhir apabila kekuasaan negara lain dimulai (Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, 1988).

Dalam paham kedaulatan negara, negara adalah sumber dalam negara. Negara (dalam arti *government* atau pemerintah) dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life*, *liberty* dan *property* dari warganya. Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut, dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran negara (Kelik Pramudya, "Teori Kedaulatan", [Http://click-gtg.blogspot.com](http://click-gtg.blogspot.com), 1 Juli 2009).

Menurut Huala Adolf (1991: 99) kedaulatan mempunyai dua ciri. Dua ciri yang sangat penting dimiliki oleh negara yaitu, pertama, bahwa kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya negara. Ciri kedua, kedaulatan

menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus merupakan fungsi dari negara.

b. Pengakuan Kedaulatan

Menurut Institut Hukum Internasional (*The Institute of International Law*) (Huala Adolf, 1991), pengakuan negara baru sebagai tindakan satu atau lebih negara untuk mengakui kesatuan masyarakat yang terorganisasi, mendiami wilayah tertentu, bebas dari negara lain, mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional, dan dianggap sebagai anggota masyarakat internasional.

Menurut Rebecca M. Wallace (1993: 81) pengakuan negara adalah pengakuan formal oleh negara lain di mana negara yang diakui mempunyai atribut kenegaraan dan menunjukkan kemauan memperlakukan wilayah tersebut sebagai negara. Pengakuan biasanya tidak akan dicabut kembali apabila syarat-syarat status sebagai negara terus dipenuhi. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi lagi, wilayah itu akan berhenti sebagai negara, tetapi tidak diperlukan penarikan kembali dari pengakuan yang telah diberikan oleh negara yang memberikan pengakuan.

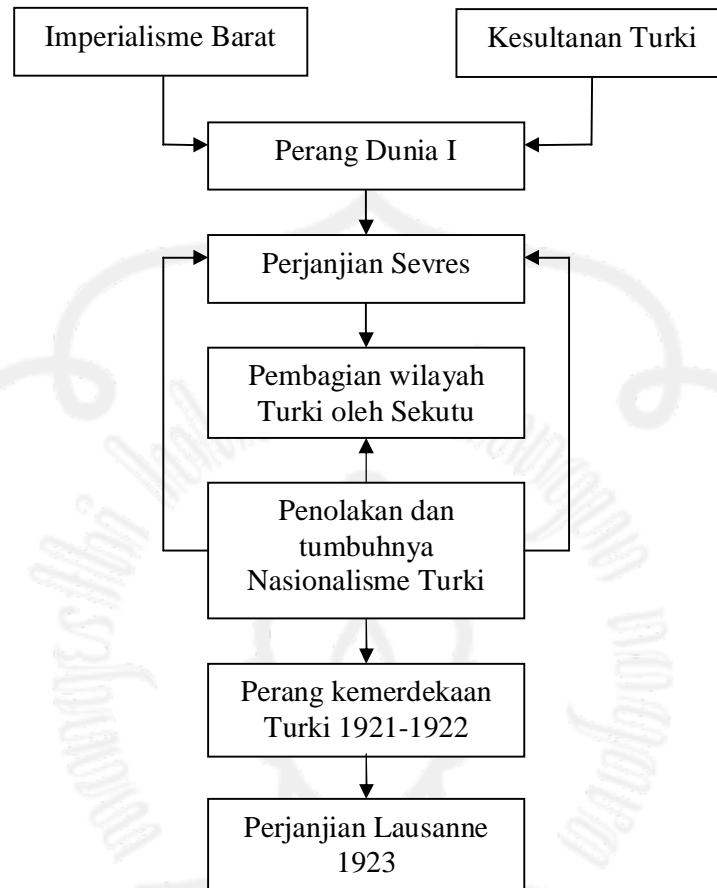
Pengakuan terhadap negara baru yang telah memiliki empat unsur negara (wilayah, pemerintah, penduduk, serta kedaulatan) dan memperoleh kemerdekaan secara damai tidak akan menimbulkan masalah. pengakuan negara baru akan menimbulkan masalah dan bahkan pengakuan berperan sangat penting apabila lahirnya negara tersebut bukan melalui cara damai. Masalah pengakuan negara baru timbul apabila lahirnya negara ini terjadi dalam dua situasi, yaitu: (1) Pernyataan sepihak (propinsi, negara bagian) yang berada dalam negara yang berdaulat, memisahkan diri dari negaranya dan memproklamasikan negara sebagai negara baru, berdaulat, dan merdeka; (2) Pernyataan sepihak melalui cara-cara kekerasan (revolusi) oleh negara baru tersebut terhadap negara yang mendudukinya (Huala Adolf, 1991: 65).

Huala Adolf (1991: 96-97) mengemukakan bahwa pengakuan terhadap negara dapat mengakibatkan pemberian hak-hak tertentu dari negara yang diakui. Hak-hak tersebut yaitu: (1) Negara yang diakui dapat mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara yang diakui; (2) Negara tersebut memiliki

kekebalan diplomatik di negara yang mengakui; (3) Negara yang diakui dapat menuntut di wilayah negara yang mengakui; (4) Negara yang diakui dapat mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu yang berada di wilayah negara yang mengakui; (5) Tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji; (6) Perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh pemerintah terdahulu dapat berlaku kembali.

Kemerdekaan negara Turki pada tanggal 20 Januari 1921 masih menimbulkan masalah dalam hal pengakuan internasional. Kemerdekaan Turki menimbulkan reaksi dari negara-negara yang mempunyai kepentingan di wilayah-wilayah Turki seperti Inggris. Sehingga, setelah perang kemerdekaan Turki berakhir dengan kemenangan Turki, Inggris dan sekutu-sekutunya mengusulkan perundingan terhadap Turki. Perundingan dimulai pada Nopember 1922 di Lausanne, Swis. Dalam perundingan itu dibahas mengenai wilayah-wilayah maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian Lausanne akhirnya disahkan pada tanggal 24 Juli 1923. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah Turki memperoleh kembali wilayah-wilayahnya, seperti Thrace Timur. Perjanjian tersebut merupakan pengakuan dari dunia internasional terhadap kedaulatan Republik Turki.

B. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Imperialisme yang berasal dari negara-negara barat telah membuat negara-negara tersebut memperluas wilayah imperiumnya, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kesultanan Turki. Perebutan wilayah yang terjadi mencapai puncaknya pada saat Perang Dunia I. Turki terlibat dalam perang tersebut dan menjadi sekutu Jerman, tergabung dalam *Triple Alliance* yang berperang melawan Inggris, Perancis, dan Rusia yang disebut *Triple Entente*.

Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan pihak *Triple Entente*. Perjanjian-perjanjian dilakukan antara *Triple Entente* dengan *Triple Alliance*

setelah perang. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan diantaranya Perjanjian Versailles, Saint Germain, Neuilly, dan Sevres.

Perjanjian yang mempunyai pengaruh terhadap Turki adalah Perjanjian Sevres. Salah satu isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa daerah Turki di Eropa diambil oleh Yunani. Hal ini menyebabkan wilayah Turki tinggal Asia kecil dan Konstantinopel. Sultan Turki menerima keputusan tersebut, tetapi golongan nasionalis yang revolusioner menolak.

Golongan nasionalis yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha menganggap Perjanjian Sevres sangat menghina bangsa Turki. Mustafa Kemal Pasha menganggap Perjanjian Sevres bukan perjanjian perdamaian. Namun, dengan adanya Perjanjian Sevres tersebut justru akan melanjutkan perlawanan golongan nasionalis terhadap Sekutu.

Sebagai reaksi atas penolakan golongan nasionalis Turki, Sekutu merencanakan untuk melakukan serangan ke wilayah Turki. Penyerangan itu akan dilakukan oleh Yunani. Dengan bantuan Inggris dan Perancis, Yunani kemudian menyerang Turki. Pasukan Yunani datang melalui Pantai Azmir dan dihadapi oleh pasukan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, kemudian terjadi perang yang disebut dengan Perang Kemerdekaan Turki.

Dalam Perang Kemerdekaan Turki, pasukan Turki berhasil menduduki kembali wilayah yang diambil oleh Yunani. Inggris dan sekutu-sekutunya melunak dan kemudian mengadakan perundingan dengan Turki di Lausanne, Swis. Dengan adanya Perjanjian Lausanne, negara nasional Turki mendapat pengakuan internasional. Perjanjian Lausanne juga dapat menyebabkan dampak yang besar terhadap perkembangan negara Turki selanjutnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Perjanjian Lausanne 1923 (Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang Kemerdekaan), penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta.
- e. Perpustakaan Ignatius Colose Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan mulai dari disetujuinya judul skripsi yaitu pada bulan Mei 2009, sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini yaitu pada bulan Juni 2010.

B. Metode penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah selalu diperlukan suatu metode tertentu yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan yang akan diteliti. Menurut Koentjaraningrat (1986 : 7) kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 43) metode adalah suatu cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan menurut Helius Sjamsuddin (2007 : 13) metode ada hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam menyelidiki suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan obyek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan, mendiskripsikan dan memaparkan terjadinya Perjanjian Lausanne 1923. Peristiwa yang menjadi pokok penelitian tersebut adalah peristiwa masa lampau, sehingga metode yang digunakan adalah metode historis atau sejarah. Dengan metode sejarah penulis mencoba merekonstruksi kembali suatu peristiwa di masa lampau sehingga dapat menghasilkan historiografi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Louis Gottschalk (1975 : 32) mengemukakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan Nugroho Notosusanto (1971 : 17) menyatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengumpulan, menguji, menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya, metode ini merupakan proses merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga menjadi kisah yang nyata.

Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 43), mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Menurut Lucey yang dikutip Helius Sjamsudin dan Ismaun (1996: 16), metode sejarah adalah seperangkat sistem yang berisi asas-asas atau norma-norma, aturan-aturan dan prosedur, metode, dan teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan saksi mata (*witness*) tentang suatu masa atau peristiwa, mengevaluasi kesaksian (*testimony*) dari saksi-saksi tersebut, menyusun

fakta-fakta yang telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya, dan akhirnya menyajikan pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah kegiatan mengumpulkan, menguji dan menganalisis secara kritis data peninggalan masa lampau dan menyajikannya sebagai hasil karya melalui historiografi. Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah metode historis, maka dilakukan langkah-langkah metode historis yang meliputi pengumpulan sumber-sumber sejarah, menguji validitas dan reliabilitas data sejarah tersebut kemudian menganalisis secara kritis untuk menghasilkan tulisan atau cerita sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipercaya.

C. Sumber Sejarah

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sejarah. Sumber data sejarah sering disebut juga data sejarah. Menurut Kuntowijoyo kata “data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *datum* (bahasa Latin) yang berarti pemberitaan (Dudung Abdurahman, 1999: 30).

Menurut Nugroho Notosusanto (1971: 19) sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa dengan mata kepala sendiri, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh oleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain.

Helius Sjamsuddin (2007: 95) mengemukakan bahwa sumber sejarah yaitu segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (*past actuality*). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (*raw materials*) sejarah yang mencakup segala macam *evidensi* (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan).

Klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan menurut bahannya, asal-usulnya atau urutan penyampaiannya dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber

menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Menurut urutan penyampaiannya sumber-sumber dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan menurut tujuannya sumber-sumber dapat dibagi atas sumber formal dan informal (Dudung Abdurahman, 1999 : 31).

Dalam usaha untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan sumber tertulis. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Louis Gottshalck (1986 : 35) mengemukakan bahwa sumber tertulis primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sumber tertulis primer juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan dari masa yang sejaman dan berasal dari orang yang sejaman. Sedangkan sumber tertulis sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir dari peristiwa yang dikisahkannya. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya.

Sumber sejarah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Dalam penelitian ini, sumber primer tidak ditemukan karena sumber-sumber tersebut berada di negara lain, sehingga tidak mampu dijangkau. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan sumber tertulis sekunder yang berupa buku-buku yang ditemukan di dalam perpustakaan-perpustakaan tempat penelitian dilakukan. Disamping itu, banyaknya sumber primer yang berada di negara lain, sehingga tidak mampu dijangkau. Sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: "*Sejarah Modern Turki*", karangan Erik J. Zürcher; "*Sejarah Peradaban Islam: Dari masa Klasik hingga Modern*", karangan Siti Maryam dkk; "*Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*", karangan George Lenczowski; "*Sejarah Umat Islam: Jilid 3*", karangan Hamka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara teknik studi pustaka. Teknik studi

pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan studi pustaka diperlukan pengetahuan tentang perpustakaan sebagai sumber literatur yang diperlukan dalam mencari materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari literatur yang tersedia (Hadari Nawawi, 1993 : 133).

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokuman dan lain-lain (Kartini Kartono, 1990: 33). Data tersebut berfungsi sebagai wahana informasi terhadap materi yang akan dibahas dalam penelitian. Dengan adanya kemajuan teknologi maka peneliti juga bisa memanfaatkan internet dalam rangka studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian.

Studi pustaka ini diperlukan peneliti untuk menggali teori-teori yang telah ada, agar memperoleh orientasi yang luas dalam permasalahan yang dipilih. Menurut Koenjaraningrat (1986: 19), keuntungan dari studi pustaka adalah: 1) memperdalam pengetahuan tentang masalah yang dipilih, 2) menegaskan landasan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran, 3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam perumusan, 4) menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian.

Studi pustaka ini dilakukan sistem kartu/katalog atau menggunakan komputer dengan cara mencatat beberapa sumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian dengan mencantumkan keterangan mengenai nama pengarang, judul buku maupun subyek yang dicari. Oleh karena itu perlu mengingat kata kunci yang terdapat dalam subyek yang dibahasnya, sehingga menemukan buku dan artikel yang dimaksudkan dalam katalog atau komputer. Buku-buku dan artikel yang telah ditemukan di perpustakaan dibaca dan dipahami, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diperoleh data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrachman (1999 : 64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996 : 89) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 38) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang dibutuhkan guna mengadakan penulisan sejarah.

Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrachman (1999 : 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992 : 2), analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian.

Menurut Backer fakta-fakta sejarah dapat dibedakan menjadi; (a) fakta-fakta keras (*hard facts*), yaitu fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya; dan (b) fakta-fakta lunak (*cold facts*), fakta-fakta yang belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya (Dudung Abdurahman, 1999: 39).

Di dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data dan membandingkan data satu dengan yang lain sesuai data yang diinginkan sehingga didapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan. Fakta-fakta itu kemudian di seleksi, diklarifikasi, dan ditafsirkan. Fakta-fakta tersebut selanjutnya dirangkai untuk dijadikan bahan penulisan penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah.

F. Prosedur Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan langkah yang dijalankan guna mendapatkan hasil yang optimal diperlukan adanya prosedur yang biasa digambarkan dalam pembagian (skema) berisi langkah sistematis yang menggambarkan kegiatan ini dari awal (persiapan) sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian historis, maka skema dalam metode historis digambarkan sebagai berikut:



1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Renner (1997:37), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, dan sedikit mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek. Sidi Gazalba (1981 : 15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan demikian heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan kata lain kegiatan mencari sumber sejarah.

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepustakaan lain yang relevan

dengan penelitian. Sumber tertulis berupa buku-buku dan literatur yang diperoleh dari beberapa perpustakaan, dan di antaranya: Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Jurusan FKIP, Perpustakaan Program Studi Sejarah FKIP UNS, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta dan Perpustakaan Ignatius Colose Yogyakarta.

2. Kritik

Setelah mengumpulkan data atau bahan, tahap berikutnya adalah langkah verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Menurut Helius Sjamsudin (1884 : 103) keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan sumber. Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian sumber, apakah sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan bentuk fisik atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain. Uji keaslian sumber dilakukan dengan pertanyaan : kapan sumber dibuat?, di mana sumber dibuat?, siapa yang membuat?, dan dari bahan apa sumber dibuat?. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kapan sumber itu dibuat, di mana sumber itu dibuat, siapa pengarangnya dan bagaimana latar belakang pendidikan pengarang.

Kritik intern adalah kritik yang berhubungan dengan kredibilitas dari sumber sejarah apakah isi, fakta dan ceritanya dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik intern dapat ditempuh dengan cara membandingkan berbagai isi dan fakta yang terdapat dalam sumber.

3. Interpretasi

Setelah sumber-sumber yang diperoleh dikritik, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan sumber-sumber tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan interpretasi, peneliti harus menghilangkan unsur subyektif yang disebabkan oleh keanekaragaman data yang diperoleh dari berbagai buku atau sumber lain melalui analisis terhadap sumber yang satu dengan sumber yang lain.

Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 40), interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis. Sedangkan interpretasi atau analisis historis menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999 : 64) bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisis.

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Langkah ini merupakan kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam langkah ini diperlukan imajinasi untuk mengaitkan fakta satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik. Pada tahap ini, menyusun fakta sejarah dibutuhkan kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik, kemampuan untuk menempatkan fakta sejarah sesuai dengan periode sejarah, kemampuan menjelaskan data yang telah ditemukan dengan menyajikan bukti-bukti dan membuat garis umum yang dapat diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Perjanjian Lausanne 1923

Perjanjian Lausanne tahun 1923 didahului oleh beberapa peristiwa yang berurutan. Antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Sevres 1920, gerakan nasionalis Turki, dan Perang kemerdekaan Turki tahun 1921 hingga tahun 1922. Rentetan peristiwa tersebut melatarbelakangi perundingan antara Sekutu dan Turki di kota Lausanne yang selanjutnya menghasilkan Perjanjian Lausanne tahun 1923. Perang Dunia I mengawali latar belakang dari Perjanjian Lausanne karena perang ini mengakibatkan Perjanjian Sevres. Perjanjian tersebut merugikan Turki. Gerakan nasionalis Turki menolak perjanjian tersebut. Sebagai reaksi dari penolakan itu, terjadi Perang Kemerdekaan Turki pada 1921 dan 1922 antara Turki melawan Sekutu. Untuk menyelesaikan sengketa setelah perang, Sekutu mengajak berunding Turki di Lausanne Swiss. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Lausanne 1923.

1. Perang Dunia I

Perang Dunia I terjadi karena beberapa macam faktor (Robin Prior dan Trevor Wilson, 2000: 319-320), yaitu:

a. Ekonomi

Jerman dan Inggris merupakan pesaing hebat dalam bidang perdagangan sesudah tahun 1880-an. Pada waktu itu, Inggris bukan lagi satu-satunya negara industri di dunia. Sebelumnya, Inggris dapat memasarkan hasil produksi industrinya ke seluruh dunia tanpa pesaing serius. Namun, setelah Jerman dapat melakukan revolusi industri, Inggris mulai mendapatkan pesaing. Jerman mempunyai industri besar, tetapi belum memiliki daerah pelembaran hasil produksi yang cukup berusaha untuk mendapatkan koloni-koloni. Akibatnya sering terjadi krisis politik dan militer antara Inggris dan Jerman, atau antara Perancis dan Jerman di Afrika. Demikian pula terjadi persaingan ekonomi antara Jerman dengan Rusia. Namun, persaingan terbesar

terjadi antara Inggris dan Jerman. Persaingan–persaingan yang terjadi menimbulkan konflik mengenai perebutan wilayah kekuasaan di daerah-daerah koloni. Konflik tersebut mencapai puncaknya pada Perang Dunia I.

b. Politik dan Nasionalisme

Persaingan politik dan cita-cita nasionalisme merupakan dampak dari nasionalisme modern yang membawa negara-negara seperti Inggris, Perancis, maupun Jerman mempertentangkan hal-hal mengenai kepentingan-kepentingan bangsanya di Afrika, Asia, dan Balkan. Kepentingan dari masing-masing negara tersebut saling bertentangan. Masing-masing negara sangat gigih membela kepentingannya karena semangat Nasionalisme. Jalan yang ditempuh untuk membela kepentingan masing-masing negara adalah dengan berperang, sehingga terjadi Perang Dunia I.

c. Kemiliteran

Sejak timbulnya sentimen-sentimen nasionalistis dan keadaan hubungan internasional menjadi buruk, masing-masing negara besar di Eropa melengkapi dirinya dengan angkatan perang yang kuat. Konflik kepentingan yang semakin memuncak antar negara besar Eropa tersebut membawa situasi ke arah peperangan dan masing-masing negara telah siap dengan angkatan perangnya.

d. Sosial

Faktor sosial ikut berbicara dalam menimbulkan Perang Dunia I. Dimulai dari kepercayaan terhadap Darwinisme sosial, yaitu pendapat bahwa bangsa yang paling kuat (dalam bidang militer) akan tetap hidup dan tumbuh hingga kepercayaan tentang superioritas orang Perancis, Jerman, Rusia, atau beberapa kultur lain berkembang di bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa bangsa mereka yang terkuat sehingga berhak untuk berkuasa.

e. Diplomatik

Akhirnya faktor diplomatik memperuncing keadaan. Antara tahun 1891 dan 1914, negara-negara besar di Eropa telah terbagi dalam dua kelompok. Masing-masing terikat oleh perjanjian-perjanjian rahasia.

Kelompok-kelompok negara-negara Eropa yang terbagi, yaitu: (1) *Triple Entente* (Inggris, Perancis, dan Rusia); (2) *Triple Alliance* (Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia).

Perang Dunia Pertama meletus pada tanggal 2 Agustus 1914 di Eropa. Turki terlibat dalam perang tersebut dengan tujuan untuk bebas dari Penjajahan Barat, menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang melepaskan diri seperti Mesir dan Siprus, memerdekakan wilayah Kaukasus dan Turkestan dari Rusia dan menggabungkannya ke dalam Kerajaan dalam bentuk federasi, serta menegakkan kembali wewenang Khalifah di seluruh dunia Islam. Turki dalam perang tersebut menjadi sekutu Jerman, sehingga Perancis dan Inggris yang tergabung dalam *Entente* dan juga Rusia menjadi lawan mereka. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah Turki dikuasai *Entente* setelah perang Balkan. Dalam perang Balkan, Turki kehilangan banyak wilayahnya (Siti Maryam, 2002: 154).

Pada tanggal 23 Nopember 1914, Sultan Mahmud Resyad dalam kapasitasnya sebagai Khalifah mengumumkan perang suci atau *jihad* melawan *Entente*. Perang suci ini dideklarasikan setelah bermusyawarah dengan *Syekh al-Islam* pada 14 Nopember. Jerman sangat mengharapkan pengaruh dari deklarasi ini terhadap penduduk-penduduk Muslim di daerah jajahan *Entente* dan Rusia di Asia Tengah. Di luar kerajaan, hanya sebagian kecil saja yang memberi sambutan terhadap seruan tersebut. Di beberapa daerah justru Umat Islam berperang bersama Rusia maupun Inggris dan Perancis melawan Jerman dan sekutu-sekutunya (Siti Maryam, 2002: 154-155).

Kerajaan Utsmani tidak berada dalam kondisi siap untuk terjun dalam perang apapun, baik secara militer, ekonomis, maupun komunikasi internal. Jerman menyadari hal ini, tetapi bagi mereka daya tarik untuk beraliansi dengan Utsmani tidak terletak pada kontribusi tentara Utsmani terhadap peperangan itu, tetapi pada pengaruhnya terhadap umat Muslim di wilayah jajahan Perancis, Inggris, dan negara-negara Balkan. Selain itu, Utsmani bisa secara efektif menghadang laju kapal Rusia melalui Selat Bosphorus dan Dardanela. Jerman tetap memberanikan diri melancarkan strategi ofensif, walaupun meragukan kekuatan militer Utsmani.

Di front Kaukasia, Rusia terlebih dahulu menyerang pada bulan Nopember 1914. Namun, tentara Utsmani berhasil menghentikan serangan mereka. Setelah langkah awal yang cukup sukses, tentara Utsmani digempur di Sarikami dalam perjalanan menuju Kars, bulan Januari 1915. Pada bulan itu, terdapat pula upaya pertama untuk menguasai Terusan Suez. Namun, upaya mereka untuk menguasai terusan itu dapat digagalkan. Tidak ada perlawanan anti-Inggris di Mesir untuk mendukung upaya Utsmani itu. Upaya kedua untuk menyerang terusan itu pada tahun 1916. Namun, upaya tersebut juga dapat digagalkan.

Setelah upaya-upaya Utsmani yang pertama itu, Entente berinisiatif menyerang. Tindakan penyerangan pertama oleh Inggris adalah pendaratan dua divisi India di hulu Teluk Parsi untuk melindungi instalasi-instalasi minyak Inggris di Teluk itu. Namun, serangan utama Entente ditujukan ke Dardanela dengan anggapan bahwa penyerangan terhadap selat itu dan pendudukan Istanbul akan memutuskan bantuan Jerman untuk kerajaan Utsmani dan akan memungkinkan Inggris memperkuat front Rusia. Upaya pertama untuk menyerang Selat Dardanela dan Bosphorus dilancarkan pada bulan Februari dan Maret 1915. Serangan ini murni operasi laut, di mana kapal-kapal perang Inggris dan Perancis berupaya untuk menghantam Utsmani kemudian Dardanela. Namun, kekalahan besar terjadi pada tanggal 18 Maret, operasi serangan ditunda dan diputuskan untuk mengadakan serbuan amfibi. Pendaratan pertama terjadi tanggal 25 April. Pasukan Inggris menduduki sejumlah pelabuhan, tetapi serangan mereka tersendat-sendat. Pendaratan-pendaratan baru pada bulan Agustus juga tidak membawa hasil. Menjelang Januari 1916, pasukan Entente itu mengevakuasi posisi-posisi mereka.

Bagi tentara Utsmani, kemenangan atas Inggris merupakan sumber kebanggaan nasional, walaupun pertempuran-pertempuran di Gallipoli merupakan perang yang paling mahal bagi mereka. Peperangan ini menelan korban 300.000 orang. Keberhasilan utama lainnya bagi tentara Utsmani juga diraih tahun 1916. Pasukan ekspedisi Inggris dari India yang menuju Tigris dikepung dan dipaksa menyerah di Kut al-Imara pada bulan Juli (Erik J. Zürcher, 2003: 143-148).

Pada tanggal 5 Juni 1916, Syarif Husein, gubernur herediter Utsmani di Makkah menyatakan perang terhadap Turki. Pernyataan itu menyebabkan pecahnya revolusi Arab. Pada mulanya, itu hanya sebuah gangguan kecil. Namun, dengan adanya bantuan perwira Inggris dan peralatan perang dari Inggris, perang kemerdekaan Arab ini berkembang menjadi ancaman serius. Revolusi itu menyebabkan tentara Turki terusir dari Makkah, Madinah, dan Jeddah. Revolusi tersebut berpengaruh terhadap wilayah lain. Gerakan tentara Syarif membuat bangsa Syria dan Transyordania bangkit melawan Turki. Gerakan itu juga menyebabkan pembelotan tentara Arab di tubuh militer Turki. Strategi Sekutu adalah berusaha memberi pukulan langsung ke jantung pertahanan Turki. Meskipun bergerak lambat karena gagal merebut Gallipoli, tentara Sekutu berhasil membuka jalan menuju Istanbul dari Balkan. Kemenangan Inggris di Front Messopotamia menyebabkan lepasnya Basrah dan Baghdad pada bulan Maret 1917, kemudian Mosul (Oktober 1917), Yerusalem (Desember 1917), dan puncaknya Turki kalah dalam pertempuran di Mejidjo (September 1918). Pada waktu itu di Front Arabia, tentara Jerman dan Turki keluar dari Palestina dan Suriah. Gerak maju tentara Inggris untuk memasuki wilayah Turki dihadap oleh Angkatan Darat ketujuh pimpinan Mustafa Kemal di Aleppo. Namun, kota Damaskus menyerah kepada tentara gabungan Inggris Arab pada tanggal 1 Oktober 1918. Turki akhirnya menawarkan gencatan senjata setelah menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani di Mudros, 30 Oktober 1918 (Siti Maryam, 2002: 154-155).

Kesepakatan dalam gencatan senjata di Mudros berisi dua puluh lima pasal. Isi dari kesepakatan tersebut antara lain: (a) penguasaan militer atas selat-selat; (b) kendali Entente atas semua jalur-jalur kereta api dan saluran telegraf; (c) demobilisasi dan pelucutan senjata pasukan-pasukan Utsmani, kecuali untuk angkatan kecil yang berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban; (d) menyerahnya semua pasukan Utsmani di propinsi-propinsi Arab; (e) pembebasan seluruh tawanan Entente yang ada di tangan Utsmani. Semua personel Jerman dan Austria diharuskan meninggalkan Turki dalam waktu dua bulan. Klausul yang paling membahayakan dari sudut pandang Utsmani adalah pada pasal tujuh yang

memutuskan Entente berhak menduduki wilayah manapun dalam Kerajaan Utsmani bila dianggap keamanannya terancam. Pasal 24 memberi Entente hak untuk mengintervensi secara militer di wilayah Propinsi-propinsi Armenia jika hukum dan ketertiban tidak dapat ditegakkan di sana. Pasal-pasal ini memungkinkan Entente untuk menggunakan kekuatan senjata. Namun, syarat ini tetap diterima oleh Utsmani karena tidak ada pilihan lain bagi mereka. Para pemimpin gerakan perlawanan tidak begitu saja memrotos persetujuan gencatan senjata. Namun, mereka menentang cara Entente menyalahgunakan syarat-syarat perjanjian tersebut (Erik J. Zürcher, 2003: 168).

2. Perjanjian Sevres 1920

Sekutu mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah Turki setelah Perang Dunia I. Turki telah kalah dan wilayahnya terpecah akibat perjanjian pembagian pada masa perang. Dalam butir 12 dari Empat Belas Butir yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Wilson dinyatakan bahwa bagian Turki dari imperium Utsmaniah yang ada sekarang harus dijamin sebagai suatu kedaulatan yang aman. Dalam pidato PM Lyold George pada tanggal 5 Januari 1918, Inggris tidak bermaksud merampas ibukota Turki atau daerah subur terkenal, Thrace, yang dikuasai Turki. Kedua pernyataan di atas menunjukkan kebebasan pelayaran melalui Selat Turki berada di bawah pengawasan internasional. Namun, pernyataan itu pun dapat dijadikan sebagai jaminan bagi daerah Anatolia sebagai milik Turki untuk tidak diganggu. Sebelum Konferensi Perdamaian diadakan, republik baru Armenia, yang ketika itu memihak kepada sekutu, menuntut bagian timur Anatolia. Untuk meneliti masalah tersebut, Presiden Wilson membentuk suatu komisi. Komisi ini berangkat ke Asia Kecil. Komisi menyarankan agar terdapat pemerintahan mandat tunggal bagi Turki dan Transkaukasia karena alasan ekonomi dan etnis. Sekutu mengusulkan Amerika Serikat sebagai pemegang mandat. Namun, pelaksanaan mandat tersebut ditolak karena Presiden Wilson ragu dan Amerika Serikat sendiri tidak terlibat perang (George Lenczowski, 1993: 66-67).

Turki telah kalah dari Inggris, tetapi kekalahan ini tidak membuat Turki terbelenggu oleh pihak yang menang. Sekutu dapat memaksakan kehendaknya di Constantinopel, Selat Arabia, dan bagian Imperium di Anatolia Selatan. Namun, di pedalaman Anatolia dan perbatasan timur lautnya bebas dari tekanan asing. Dalam keadaan demikian, Barat makin teliti dalam menyusun rencananya untuk melaksanakan perjanjian pembagian Turki. Keputusan Sekutu tentang Anatolia dibuat di Paris dan San Remo sepanjang tahun 1919 hingga 1920 (George Lenczowski, 1993: 67).

Tiga masalah penting berkaitan dengan masalah Anatolia (Erik J. Zürcher, 2003: 185-186) adalah:

a. Masalah Armenia.

Konferensi memutuskan untuk mendirikan sebuah negara Armenia merdeka di Anatolia timur. Namun, kesepakatan ini mengalami jalan buntu karena Turki menentangnya. Lokasi geografis daerah itu mengartikan bahwa pemberlakuan keputusan itu di hadapan oposisi bersenjata Turki akan mengharuskan adanya invasi militer besar-besaran. Entente sudah kekurangan bekal dan peralatan untuk invasi tersebut.

b. Klaim Italia dan Yunani atas daerah yang sama di Asia kecil barat daya.

Italia memiliki klaim lebih dulu, tetapi posisinya diperlemah oleh keinginan terhadap klaim-klaim teritorial. Sementara Yunani memiliki dukungan yang lebih kuat dari Inggris. Inggris melihat adanya kekuatan tandingan yang berharga yang dimiliki Yunani untuk menghadapi Perancis dan Italia di Mediterania timur. Akhirnya, Yunani diberi izin untuk menduduki Izmir dan sekitarnya pada Mei 1919.

c. Posisi Istanbul serta selat-selat.

Nilai politik dan strategis di daerah-daerah ini di mata Inggris mengartikan bahwa apabila daerah-daerah itu tetap dikuasai Kerajaan Utsmani, seluruh wilayah kerajaan itu harus berada di bawah pengawasan pihak asing tertentu. Jika daerah-daerah itu harus berpisah dari kerajaan Utsmani, kerajaan ini akan menjadi tidak signifikan lagi, sehingga hanya akan bergantung pada sarana-sarana yang dimilikinya sendiri. Inggris

mengambil posisi yang berhaluan keras, sedangkan Perancis lebih bersikap damai terhadap warga Turki, dan menginginkan mereka tetap memiliki Istanbul.

Syarat-syarat dalam perundingan tersebut diserahkan kepada delegasi Utsmani pada tanggal 11 Mei 1920. Istanbul tetap di tangan Utsmani, tetapi syarat-syarat itu terlalu berat sehingga delegasi Utsmani menolak untuk menerimanya (Erik J. Zürcher, 2003: 187).

Perundingan di Paris dan San Remo ditindaklanjuti pada Perjanjian Sevres (George Lenczowski, 1993: 68-69) yang berisi:

a. Klausul Teritorial

1) Arabia

Turki dipisahkan dari semua bagian Arabia yang berada di bawah Imperium Utsmaniah. Kerajaan Hejaz memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka. Turki juga melepaskan kontrol atas Suriah, Palestina, dan Mesopotamia yang kemudian nasibnya akan ditentukan oleh negara-negara utama Sekutu.

2) Turki di Eropa

Thrace Timur diserahkan kepada Yunani hingga garis Katalia. Selanjutnya, Yunani menerima Thrace Barat dari Sekutu yang sebelumnya diperoleh dari Bulgaria, sehingga Yunani memajukan batasnya sampai dua puluh mil dari ibukota Turki.

3) Smyrna dan kepulauan di Laut Aegea

Kota dan Distrik Smyrna ditempatkan di bawah pemerintahan Yunani selama lima tahun. Setelah itu penduduknya diizinkan membentuk lembaga tetap di bawah Yunani melalui plebisit. Pulau Imbros dan Tenedos diserahkan kepada Yunani dan kedaulatan Yunani diakui atas sejumlah pulau lainnya di Laut Aegea, sedangkan Kepulauan Docecanese dan Rhodes diserahkan kepada Italia.

4) Armenia

Turki mengakui Armenia sebagai negara merdeka dan mengizinkannya menyetujui arbitrase Wilson yang berkenaan dengan perbatasan kedua negara.

5) Kurdistan

Turki menyetujui untuk memberi daerah otonomi kepada bangsa Kurdi di sebelah timur Sungai Efrat dan menyetujui suatu rencana hasil pertimbangan komisi internasional yang disusun oleh Inggris, Perancis, dan Italia. Turki juga menyetujui perubahan batas negara dengan Iran dan daerah Kurdi.

6) Selat-Selat Turki di Konstantinopel

Turki menyetujui pengawasan internasional atas perairan di Selat dan demiliterisasi zona perbatasan. Constantinopel tetap berada di bawah kedaulatan Turki.

b. Pembatasan Kedaulatan Turki

1) Pembatasan angkatan perang

Angkatan perang Turki dibatasi sampai 50.000 orang. Dinas wajib militer dihapuskan dan diadakan pembatasan persenjataan. Angkatan perang harus berada di bawah penasihat Sekutu atau negara-negara netral. Komisi pengawasan Sekutu berwenang untuk mengawasi pelaksanaan klausul ini.

2) Klausul keuangan

Turki setuju untuk menerima pengawasan ketat komisi keuangan yang mewakili Inggris, Italia, dan Perancis. Komisi ini mempunyai wewenang yang luas untuk memeriksa utang negara Utsmaniah, anggaran negara Turki, peredaran mata uang, pinjaman umum dan konsesi, pabean, serta pajak langsung. Dengan demikian, komisi ini menjalankan kekuasaan eksekutif.

3) Kapitulasi

Kapitulasi tetap dipertahankan, dan ditambahkan ketentuan baru. Menurut pandangan Turki, ketentuan ini merendahkan derajat mereka.

4) Golongan minoritas

Turki menerima berbagai klausul yang memaksanya menghormati hak-hak minoritas agama dan nasional, terutama bangsa Armenia, Yunani, Asiro-Kaldea, Kurdi, dan umat Kristen pada umumnya.

Perjanjian tersebut disahkan pada tanggal 10 Agustus 1920.

Perjanjian Sevres menimbulkan kemarahan rakyat di seluruh Turki. Perjanjian ini sangat menghina bangsa Turki dan menurunkan statusnya menjadi negara kecil yang wilayah dan kedaulatannya dibatasi. Mustafa Kemal menyatakan bahwa perjanjian Sevres bukanlah sebuah perjanjian perdamaian, tetapi merupakan sesuatu yang justru akan melanjutkan peperangan (Hamka, 1975: 328).

3. Gerakan Nasional Turki

Golongan nasionalis Turki semakin menunjukkan perkembangannya setelah Perang Dunia I. Pergerakan-pergerakan golongan ini semakin gencar dalam melawan sekutu maupun pihak yang mendukungnya, seperti pihak Kerajaan. Selain aktivitas-aktivitas bawah tanah mereka, pihak nasionalis berinisiatif untuk memperoleh dukungan publik di masing-masing propinsi. Perkumpulan-perkumpulan didirikan untuk mempertahankan hak-hak nasional negara Turki. Pihak Unionis yang berada di balik organisasi biasanya berupaya merekrut para tokoh terkemuka dan para pemuka agama untuk bertindak sebagai ketua-ketua perkumpulan untuk menarik dukungan luas. Perkumpulan-perkumpulan itu di antaranya didirikan antara bulan Desember 1918 dan Oktober 1920. Perkumpulan-perkumpulan itu kemudian akan menyatakan karakter Turki dan Muslim di satu wilayah dan tekadnya untuk tetap menyatu dengan tanah airnya (Erik J. Zürcher, 2003: 188-189).

Pergeseran dari nasionalisme multi ras atau bangsa dan agama menjadi nasionalisme Turki hampir tidak terasa, dan mungkin tidak akan melangkah terlalu jauh apabila Sultan Mahmud Vehideddin tidak memutuskan untuk melawan para nasionalis dan bekerja sama dengan Sekutu yang menduduki negeri itu. Kelompok nasionalis bebas bergerak di pedalaman Anatolia dan daerah perbatasan di timur laut karena lepas dari kontrol asing. Cita-cita mereka adalah

mempertahankan keutuhan masyarakat Islam di bawah kesultanan dan kekhalifahan. Turki kecewa dengan instruksi Sultan Mahmud Vehideddin kepada pasukan Turki di Samyra agar bertahan terhadap invasi Yunani tersebut. Di bawah pimpinan Jenderal Kazim Karabekir yang menjadi komandan militer di Erzerum, sebuah gerakan pembebasan nasional lahir di Anatolia

Mustafa Kemal, yang ditempatkan di Samsun sebagai Inspektur jenderal Angkatan Darat kesembilan, muncul dari Anatolia Timur empat hari setelah invasi Yunani. Ia menolak perintah kembali ke Istanbul dan memusatkan perhatiannya pada finalisasi program perjuangan nasional bersama Kazim Karabekir, Ali Fuad Pasha, dan Husein Rauf (Siti Maryam, 2002: 156). Ia kemudian mengadakan propaganda yang menghimbau kebanggaan nasional bangsa Turki. Didukung oleh segala kemampuannya, Kemal berhasil membangun bangsanya (George Lenczowski, 1993: 70).

Berdasarkan propaganda dari Mustafa Kemal tentang kebanggaan nasional bangsa Turki, golongan nasionalis menyelenggarakan sebuah kongres delegasi propinsi-propinsi timur di Erzerum dari tanggal 23 Juli sampai 19 Agustus 1919. Kongres ini menghasilkan resolusi yang antara lain menyatakan tuntutan atas kemerdekaan dan terciptanya persatuan bagi rakyat Turki yang bersatu dalam agama, ras, dan tujuan. Resolusi tersebut dikukuhkan oleh kongres di Sivas pada tanggal 4 September 1919 yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari seluruh kerajaan. Kelompok-kelompok perjuangan meleburkan diri di bawah Liga Pertahanan dan Hak-hak di Anatolia dan Rumelia. Resolusi yang sudah diformulasikan dalam bentuk program enam pasal yang dinamakan Pakta Nasional. Pakta Nasional itu kemudian diajukan ke Parlemen di Istanbul tanggal 28 Januari 1920 (Siti Maryam, 2002: 156). Isi program enam pasal (George Lenczowski, 1993: 70) tersebut adalah: (1) Pengakuan atas penentuan nasib sendiri bangsa Arab serta tuntutan atas kemerdekaan dan terciptanya persatuan bagi seluruh Imperium yang dihuni oleh mayoritas Muslim Utsmaniah, yaitu mayoritas bangsa Turki dan Kurdi. (2) Penerimaan plebisit bagi Batum, Karz, dan Ardahan. (3) Penerimaan plebisit bagi Thrace Timur. (4) Permintaan akan keamanan Constantinopel yang merupakan kedudukan Khalifah dan Sultan. Jika

permintaan ini dipenuhi, ijin pengawasan internasional terhadap selat diberikan. (5) Perlindungan bagi kaum minoritas dalam arti bahwa perlindungan bagi minoritas Muslim yang terdapat di negara-negara tetangga. (6) Tuntutan akan kemerdekaan secara penuh, baik politis maupun ekonomis.

Parlemen mengesahkan Pakta Nasional pada bulan Februari 1920. Hal itu menyebabkan sekutu meningkatkan pengawasannya terhadap Istanbul. Pasukan Inggris menangkap simpatisan Nasionalis, termasuk beberapa anggota Parlemen pada 16 Maret 1920. Hal ini dibiarkan oleh Sultan. Dua hari berikutnya, Parlemen mengadakan sidang untuk menyatakan protes atas penangkapan-penangkapan terhadap anggota-anggotanya. Pada waktu yang hampir sama, Mustafa Kemal mengadakan pemungutan suara untuk majelis darurat baru yang segera bersidang di Ankara, markas tokoh nasionalis. Sedangkan Sultan membubarkan Parlemen pada tanggal 11 April 1920. Dikeluarkan pula fatwa dari *Syekh al-Islam* yang menyatakan bahwa para pemimpin nasionalis adalah gerombolan pemberontak dan kewajiban muslim untuk membunuhnya atas perintah Khalifah. Pihak Sultan merekrut suatu Laskar Khalifah untuk melawan kaum nasionalis. Pihak nasionalis tidak gentar dan terus berusaha untuk melakukan perlawanan dengan melibatkan anggota parlemen.

Mustafa Kemal mengundang beberapa anggota parlemen ke Ankara untuk untuk ambil bagian dari majelis nasional. Sembilan puluh dua anggota parlemen memenuhi undangan tersebut dan bersama 232 wakil yang dipilih oleh cabang-cabang lokal gerakan perlindungan Hak-hak membentuk Majelis Tinggi Nasional.

Majelis Tinggi Nasional bersidang di Ankara tanggal 23 April. Sidang memutuskan Mustafa Kemal menjadi Presiden Majelis Tinggi Nasional yang mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan suatu dewan yang terdiri dari sebelas orang menteri. Meskipun Kemal menyatakan kesetiaannya tetap pada Khalifah, perlawanan terhadap para nasionalis terus berlanjut (Siti Maryam, 2002: 157 ; Erik J. Zürcher, 2003 : 194). Konfrontasi semakin dekat karena kaum nasionalis tidak akan pernah menerima syarat-syarat persetujuan yang disetujui

oleh Entente, termasuk Perjanjian Sevres yang dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa Turki.

4. Perang kemerdekaan Turki 1921-1922

Mustafa Kemal menyatakan bahwa perjanjian Sevres bukanlah sebuah perjanjian perdamaian, tetapi merupakan sesuatu yang justru akan melanjutkan perang. Sebagai reaksi atas penolakan golongan nasionalis Turki, Sekutu merencanakan untuk melakukan serangan ke wilayah Turki. Penyerangan itu akan dilakukan oleh Yunani. Dengan bantuan Inggris dan Perancis, Yunani kemudian menyerang Turki. Pasukan Yunani datang melalui Pantai Azmir dan dihadapi oleh pasukan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, kemudian terjadi perang yang disebut dengan Perang Kemerdekaan Turki (Hamka, 1975: 328).

Pada musim panas 1920, tentara Yunani memperluas zona pendudukannya ke seluruh Asia Kecil bagian barat dan barat laut serta ke Thrace, di mana hanya tekanan Entente yang kuat yang bisa mencegah mereka untuk mendekati Istanbul. Tentara Nasionalis Turki di barat masih sangat lemah dan harus mengandalkan perang gerilya. Di timur, tentara telah bersiaga untuk melancarkan serangan demi menguasai kembali Propinsi Kars, Ardahan, dan Batum. Namun, pasukan Nasionalis itu diperintahkan untuk menunda serangan, sebab para pemimpin di Ankara berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan Uni Soviet.

Perundingan antara Turki dan pihak Bolshevik mengenai bantuan militer, finansial, dan rute langsung antara kedua negara berlangsung sejak Juli 1920. Namun, pihak Bolshevik menunda perundingan itu. Hal ini tidak bisa diterima oleh pihak Turki. Perundingan terhenti dan tanggal 28 September tentara Kazim Karabekir bergerak ke Sarikami, wilayah Timur Turki. Dua hari kemudian, kota itu berhasil dikuasai. Setelah pertempuran dihentikan selama satu bulan, Pasukan Turki disebar kembali. Pertempuran dimulai lagi tanggal 27 Oktober, dan menjelang Nopember, Armenia dikalahkan. Perjanjian damai yang diadakan di Alexandropol, 2 Desember 1920 merupakan perintah Turki. Menjelang awal tahun 1921, negosiasi antara kaum nasionalis Turki dan pihak Bolshevik dimulai

lagi. Perundingan ini menghasilkan perjanjian persahabatan. Perjanjian damai dengan Armenia dan perjanjian dengan Rusia memungkinkan pihak nasionalis mengirimkan pasukan ke barat untuk menghadang tentara Yunani yang mulai bergerak ke Timur (George Lenczowski, 1993: 71).

Upaya pertama yang dilakukan Yunani untuk bergerak ke timur dari Bursa ke Eskisehir ketika pasukan Turki di bawah pimpinan Kolonel Ismet berhasil menghadang dan mengalahkannya di Inonu, 10 Januari 1921. Sebagai akibat dari kemenangan-kemenangan atas Armenia dan di Inonu, posisi diplomatik kaum nasionalis menjadi semakin kuat. Perancis dan Inggris mulai berpendapat bahwa revisi Perjanjian Sevres tidak bisa dilakukan lagi (Erik J. Zurcher, 2003: 197-198).

Sekutu mengundang pemerintah Utsmani dan Yunani untuk bermusyawarah di London yang dimulai tanggal 21 Februari untuk membicarakan kemungkinan merevisi perjanjian itu. Pencapaian kesepakatan dengan kaum Nasionalis diserahkan kepada pemerintah Utsmani. Hal itu tidak bisa diterima oleh kaum nasionalis, sebab mereka memandang diri mereka sebagai satu-satunya wakil yang sah dari “kehendak nasional”. Pada akhirnya, undangan resmi disampaikan kepada pihak nasionalis melalui pemerintah Italia. Kedua belah pihak pada mulanya berposisi ekstrem. Pihak Turki terikat oleh Pakta Nasional mereka dan pihak Yunani menuntut agar syarat-syarat perjanjian damai bahkan harus diperberat lagi sebagai hukuman atas serangan tentara Turki. Negara-negara besar berusaha menemukan solusi mengenai daerah-daerah yang diperebutkan, namun hal ini ditolak oleh pihak Yunani. Proposal-proposal Yunani untuk berdirinya sebuah propinsi otonom di sekitar Izmir terhenti karena adanya penolakan dari pihak Turki. Ketika pihak Yunani meminta kepastian bahwa mereka bebas untuk memulai serangan sekalipun konferensi sedang berlangsung, Perdana Menteri Inggris, Lloyd George, yang diberitahu bahwa tentara Yunani siap menyerang, mendesak diberikannya kepastian itu (Erik J. Zurcher, 2003: 198).

Tentara Yunani kemudian memulai serangan kembali. Mereka sekali lagi dihadang di Inonu pada 7 April 1921. Namun, pada musim panas mereka

mendobrak dan menduduki Afyon–Karahisar, Kutahya, dan jalur kereta api Eskisehir yang penting. Jatuhnya Eskisehir menimbulkan kepanikan besar di Ankara. Untuk mengatasi hal itu, Mustafa Kemal memegang komando angkatan bersenjata atas permintaan majelis. Segala kekuasaan majelis diserahkan kepadanya selama tiga bulan. Setiap calon tentara dikerahkan untuk membantu Kemal. Tentara nasionalis mengambil posisi di Sungai Sakarya, sekitar 50 mil dari barat dan barat daya Ankara. Di padang rumput Anatolia terjadi pertempuran besar yang sangat menentukan. Pertempuran ini berlangsung selama dua minggu dengan kemenangan di pihak Turki pada tanggal 13 September, ketika pasukan Yunani mulai mundur. Keletihan tentara Turki menghalanginya untuk terus mengejar lawannya. Front itu statis selama hampir setahun, di mana Yunani masih menguasai Asia Kecil sebelah barat sampai ke tapal batas. Afyon-Karahisar-Eskisehir (George Lenczowski, 1993: 72).

Pada tanggal 22 Agustus 1922, Mustafa Kemal memerintahkan tentaranya untuk menyerang tentara Yunani. Bagi tentara Yunani, serangan Kemal yang dilancarkan ke sebelah selatan Afyon-Karahisar merupakan satu kejutan besar. Mereka tercerai-berai dan sebagian besar ditangkap di sebelah barat Afyon. Pada tanggal 30 Agustus, pertempuran dimenangkan oleh Turki. Yunani berhasil diusir ke laut Mediterania pada tanggal 11 September (Siti Maryam, 2002: 158)

. Melihat keberhasilan kaum nasionalis dan kekalahan Yunani, Lloyd George mengirimkan permohonan kepada Sekutu agar melindungi mereka di selat pada tanggal 15 September. Namun, Italia dan Perancis tidak menanggapi permohonan tersebut. Hari berikutnya, kontingen Inggris di bawah Jenderal Harington mendarat di bagian Asia Dardanela, yaitu Chanak, sementara Pasukan Kemal semakin mendesak. Dalam waktu singkat, tampak seolah-olah Turki dan Inggris akan saling bertempur. Namun, kedua-duanya tetap menahan diri. Konvensi Mudania pada tanggal 11 Oktober menghindarkan keduanya dari peperangan. Konvensi ini menyangkut pengembalian Thrace Timur dan Andrinopel kepada Turki. Selain itu Kemal menerima rencana pengawasan internasional atas Selat Bosphorus. Jalan terbuka bagi penyelesaian perdamaian secara menyeluruh. Selanjutnya, pada tanggal 20 Nopember 1922, suatu

konferensi perdamaian diselenggarakan di Kota Lausanne antara Turki dan Sekutu (George Lenczowski, 1993: 72-73).

B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Lausanne 1923

1. Tahap Perundingan

Entente mengundang Turki untuk memulai perundingan-perundingan segera setelah meredanya permusuhan. Pihak Turki menginginkan agar negosiasi-negosiasi itu diadakan di Izmir. Namun, Entente menolak untuk berunding di tanah Turki. Kota Lausanne di Swis akhirnya dipilih sebagai tempat perundingan. Perancis, Italia, dan Yunani adalah tuan rumah sedangkan Turki, baik pemerintah di Ankara maupun di Istanbul, diminta untuk mengirimkan delegasi-delegasinya. Mustafa Kemal mengangkat Ismet Pasha sebagai pemimpin delegasi Turki di Lausanne. Mustafa Kemal memilihnya karena Ismet adalah pendukungnya yang paling loyal dan bisa diandalkan, tidak seperti Perdana Menteri Husein Rauf yang pro-Inggris maupun komisaris urusan luar negeri, Yusuf Kemal yang pro-Soviet. Keberangkatan Ismet ke Lausanne dibekali instruksi-instruksi tegas untuk tidak menyimpang dari Pakta Nasional.

Konferensi dibuka pada tanggal 20 Nopember 1922. Negara-negara yang mengirimkan utusan adalah Inggris Raya, Perancis, Italia, Yunani, dan Turki, sedangkan Uni Soviet, Ukraina, Georgia, Rumania, serta Bulgaria diundang untuk menghadiri pertemuan di mana mereka mempunyai kepentingan langsung. Perundingan-perundingan diperkirakan akan menemui banyak kesulitan sebab sejak awal terdapat berbagai perspektif yang berlainan di kedua belah pihak. Entente menganggap diri mereka sebagai pemenang Perang Besar. Dalam pandangan Entente, konferensi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan syarat-syarat Perjanjian Sevres dengan situasi baru. Sedangkan dalam pandangan pihak Turki, merekalah yang merupakan pemenang dalam perang kemerdekaan nasional mereka dan bagi mereka. Pihak Turki juga beranggapan bahwa Perjanjian Sevres hanyalah sejarah masa lalu. Pada awalnya, delegasi Turki mengalami kesulitan dalam perundingan di Lausanne tersebut. Mereka tidak dianggap sebagai partner

yang setara. Menteri Luar Negeri Inggris yang merupakan figur dominan dari pihak Entente, Lord Curzon, bersikap amat arogan dan ingin menang sendiri. Pihak Turki betul-betul lemah karena kurangnya pengalaman diplomatik (Erik J. Zürcher, 2003: 206-208).

Masalah-masalah yang dirundingkan dibagi ke dalam tiga pokok bahasan: masalah teritorial dan militer; perekonomian dan keuangan; dan posisi orang-orang asing serta kaum minoritas. Pada dua bulan pertama, hanya sedikit kesepakatan yang dicapai mengenai semua pokok masalah ini. Pada awal Februari, semua masalah teritorial yang penting seperti Thrace, penguasa-penguasa selat di masa depan, telah diselesaikan. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk menunda perundingan mengenai masalah Mosul. Ismet tetap mempertahankan agar Mosul tetap masuk Turki dan menghapus kapitulasi, tetapi Curzon tidak menyetujui kedua masalah itu. Sedangkan masalah-masalah dalam bidang lainnya terbukti tidak dapat diatasi. Konferensi berhenti untuk sementara. Para delegasi pulang ke negeri mereka masing-masing (George Lenczowski, 1993: 73).

Semangat nasionalis yang amat kuat kini menguasai Ankara. Pada awal Maret 1923, baik Ismet maupun pemerintah mendapat serangan sengit melalui konsesi yang telah mereka buat. Mustafa Kemal berintervensi secara pribadi agar majelis mau mendesak pemerintah untuk melanjutkan perundingan-perundingan. Pihak Turki menyerahkan 100 halaman amandemen sebagai *draft* perjanjian di bulan Februari. Setelah amandemen-amandemen dipelajari oleh oleh para ahlinya, pada akhir Maret Entente mengundang pihak Turki untuk membuka kembali perundingan-perundingan. Kedua pihak berunding kembali pada tanggal 23 April. Delegasi Yunani dan Turki segera menyelesaikan masalah-masalah bilateral mereka. Turki menerima koreksi mengenai tapal batas di Thrace sebagai imbalan penangguhan klaimnya atas ganti rugi perang. Namun, masalah utama adalah penegasan negara-negara Entente mengenai konsesi-konsesi ekonomi dan yudisial sebagai imbalan atas pengakuan penghapusan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Pihak Turki menolak segala sesuatu yang melanggar kedaulatan negara Turki baru. Posisi Entente memang lemah sebab di negara-negara mereka tidak ada

penduduk yang siap berperang demi masalah-masalah ini. Karena itu, untuk menghindari terjadinya perang, Entente harus mengusahakan tercapainya kesepakatan dengan pihak Turki. Setelah diupayakan, akhirnya kesepakatan dicapai tanggal 17 Juli. Ismet meminta izin pemerintah di Ankara untuk menandatangani kesepakatan itu. Mustafa Kemal mengabulkan izin tersebut. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923 (Erik J. Zürcher, 2003: 208-209).

2. Hasil Perundingan

Hasil dari perundingan di Lausanne telah mewujudkan tujuan-tujuan Pakta Nasional, walaupun tidak secara detail. Dalam batas-batas Pakta Nasional itu, Turki yang muncul setelah perundingan adalah sebuah negara yang betul-betul negara yang berdaulat. Isi Perjanjian Lausanne (George Lenczowski, 1993: 73-74) meliputi:

a. Klausul teritorial.

Dalam klausul teritorial, dihasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: (1) Kesatuan etnis Turki diakui dan pemisahan dari tanah Arabia ditegaskan; (2) Turki memperoleh kembali Thrace Timur sampai Sungai Maritza dan kota Karagach di tepi baratnya; (3) Pulau Imbos dan Tenedos diserahkan kepada Turki, tetapi pulau-pulau lain di Laut Aegea ditetapkan bagi Yunani; (4) Dodecanese milik Italia sedangkan Siprus milik Inggris ditegaskan. Armenia tidak disebut-sebut, itu berarti pengakuan implisit terhadap persetujuan Turki-Soviet yang menyangkut perbatasan Transkaukasia; (5) Smyrna diserahkan kepada Turki sebagai bagian integral dari Anatolia; (6) Batas dengan Suriah mengikuti garis yang diatur dalam persetujuan Franklin-Bouillan, 20 Oktober 1921, yang berarti kawasan Alexandretta dikeluarkan dari wilayah Turki; (7) Batas dengan Irak ditunda sampai perjanjian antara Inggris, pemegang mandat, dengan Turki; (8) Jika persetujuan itu gagal diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun, masing-masing pihak berjanji untuk menerima arbitrase LBB.

Pada saat itu, wilayah Mosul berada di bawah wewenang Inggris-Irak. Masalah kemerdekaan atau otonomi bangsa Kurdi tidak disebutkan.

b. Pembatasan kedaulatan.

Perjanjian Lausanne merupakan kemenangan bagi Turki, bila dibandingkan dengan Perjanjian Sevres. Kapitulasi dihapuskan, dan sebaliknya Turki berjanji untuk menerima para pengamat netral dalam sistem peradilan dengan penguasa-penguasa nominal dan murni. Turki bebas dari pengawasan asing dalam bidang ekonomi dan keuangan serta dari tuntutan Sekutu dari ganti rugi. Tidak ada pembatasan bagi jumlah militer serta angkatan laut. Hanya saja, Turki harus menarik militernya dari zona 30 kilometer sepanjang batas Thrace. Turki menerima perjanjian-perjanjian pokok guna melindungi golongan minoritas. Hal itu sama seperti yang direncanakan oleh beberapa negara Eropa dalam konferensi Perdamaian Paris. Yunani dan Armenia tidak disinggung secara khusus.

c. Kawasan Selat.

Pembatasan utama kedaulatan Turki hanya pada kontrol atas Selat yang diinternasionalisasi. Namun, di sini pun Turki membuktikan posisinya. Konvensi Selat menetapkan komisi internasional yang dipimpin oleh warga negara Turki di bawah pengawasan LBB. Kebebasan terbatas bagi pelayaran melalui Selat dinyatakan, dan ditetapkan pula empat zona bebas militer di pesisir Eropa dan Asia, di sekitar Bosphorus dan Dardanela. Pulau-pulau di Laut Marmara juga bebas dari militer. Namun, Turki masih diperbolehkan menempatkan 12.000 pasukan di Constantinopel dan diberi kebebasan transit bagi pasukannya untuk menyeberangi zona netral yang ditentukan.

d. Pertukaran penduduk.

Persetujuan Yunani-Turki yang terpisah tentang pertukaran wajib bagi golongan minoritas Yunani yang tinggal di Turki dan golongan minoritas Turki yang tinggal di Yunani. Orang Yunani di Constantinopel dan orang Turki di Thrace Barat tidak termasuk ke dalam pertukaran ini.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, negara nasional Turki mendapat pengakuan internasional. Tuntutan kaum nasionalis dan Pakta Nasional telah tercapai. Turki memperoleh lagi kemerdekaan dan kesatuan wilayah etnisnya. Turki berhasil melepaskan campur tangan asing yang mengawasi urusan militer, peradilan, dan ekonomi. Turki telah menjadi negara yang berdaulat penuh (Siti Maryam, 2002:158).

Kemerdekaan Turki telah diakui dalam Perjanjian itu. Namun, ada dugaan bahwa kesepakatan ini akibat tekanan diplomatik dari pihak Sekutu terhadap kemerdekaan dan eksistensi Turki. Mereka menuntut agar Turki menjadi negara yang mengikuti negara-negara barat secara total. Apabila Turki tidak melaksanakannya, Negara-negara besar Eropa akan terus-menerus mengancam kemerdekaan Turki. Hal itu seperti yang dilakukan oleh negara-negara Barat pada masa sebelumnya dalam menekan secara diplomatik pemerintahan sultan di Istanbul untuk melakukan reformasi. Mustafa Kemal sangat prihatin dengan ancaman tersebut yang dianggapnya berbahaya. Ia berusaha menekankan dalam pidato-pidatonya bahwa bangsa Turki ingin menjadi bangsa yang progresif seperti negara-negara Barat. Jaminan itu ternyata tidak membawa hasil yang positif. Akibatnya, ia mengambil program dari Barat dan menjadikan Turki anggota dari peradaban Barat. Hal itu berpengaruh terhadap kebijakan pembaharuan Kemal di Turki setelah merdeka (A. Mukti Ali, 1994: 101-102).

C. Dampak Perjanjian Lausanne 1923

1. Dampak Politik

a. Dalam Negeri

Dengan disahkannya Perjanjian Lausanne 1923, pemerintah Kemal mendapatkan pengakuan internasional. Turki memperoleh kembali kemerdekaannya dan kesatuan wilayah etnisnya, serta melepaskan belenggu asing yang mengawasi urusan militer, peradilan, dan ekonomi. Turki bangkit dari siksaan berat selama ini dengan lahirnya kebanggaan nasional, menikmati

kepemimpinan baru yang progresif, miskin tetapi yakin akan masa mendatang, dan kebersamaan dalam masyarakatnya (George Lenczowski, 1993: 74).

Perjanjian Lausanne telah mewujudkan kemerdekaan penuh bagi Turki. Namun, kemerdekaan itu adalah kemenangan bagi Golongan Nasionalis Turki, bukan kemenangan seluruh Turki. Mustafa Kemal yang selanjutnya diangkat menjadi Presiden melakukan banyak perubahan. Perubahan yang dilakukan Kemal membuat eksistensi kekhalifahan terancam.

Segera setelah kemenangan dapat dipastikan, Kemal menyatakan bahwa ia punya gagasan baru. Kemal ingin menciptakan negara Turki modern dengan legitimasi otoritas politik atas prinsip populisme. Kedaulatan dan semua kekuatan administratif harus diberikan kepada rakyat. Dengan demikian, negara modern harus membebaskan agama dari posisinya sebagai alat politik, sebagaimana biasa terjadi pada selama berabad-abad. Langkah pertama adalah menghapuskan kesultanan, sementara kekhalifahan tetap dipertahankan sebagai pemegang jabatan keagamaan tanpa memiliki kekuasaan politik. Kemal beralasan, ketika Khalifah Abbasiyah telah kehilangan seluruh kekuasaannya pada masa akhir pemerintahannya, ia tetap dianggap sebagai lambang persatuan dan simbol Islam. Lagi pula, dualisme dalam pemerintahan Turki harus segera diakhiri karena konstitusi tahun 1921 dengan jelas menyebutkan Majelis Agung Nasional adalah satu-satunya wakil sah rakyat. Gagasan Kemal itu mendapat perlawanan keras dari anggota komite Syariah, terutama para ulama, walaupun kemudian ia berhasil mengakhirinya dengan menegaskan bahwa bangsa Turki telah menyatukan kedaulatan dan kesultanan di tangan mereka sendiri. Kemal berhasil meyakinkan Majelis Agung Nasional. Kemudian, Majelis Agung Nasional menerima gagasan tentang penghapusan kesultanan tersebut (Siti Maryam, 2002: 159).

Tanggal 1 Nopember 1922, Majelis Agung Nasional mengeluarkan resolusi tentang penghapusan kesultanan. Resolusi juga menetapkan bahwa kekhalifahan, termasuk keluarga Utsmaniah, tergantung kepada negara Turki dan yang akan dipilih menjadi Khalifah oleh Majelis adalah anggota keluarga Utsmaniah yang pengetahuannya dan kepribadiannya paling patut dan tepat (Muhammad Khan Nur, 1959).

Hakikat sebenarnya dari negara Turki yang baru muncul masih belum menentu. Kesultanan Utsmani telah dihapuskan, negara itu diperintah oleh majelis nasional yang bukan saja memilih presiden, tetapi juga memilih menteri secara langsung. Hubungan konstitusional antara majelis dan Khalifah tidak jelas. Khalifah, sebagaimana disusun tahun 1922, secara murni merupakan satu fungsi keagamaan. Namun, tidak dapat dielakkan lagi bahwa orang banyak harus tetap memandang Khalifah sebagai kepala negara, walaupun hanya secara emosional. Lebih dari itu, sebagai Khalifah, yurisdiksinya melebihi batas-batas wilayah Turki dan meliputi seluruh dunia Islam. Mustafa Kemal mengemukakan bahwa dia bermaksud mengubah situasi yang membingungkan itu dan memproklamasikan republik. Mustafa Kemal mengajukan sebuah proposal kepada majelis untuk memproklamasikan republik, dengan seorang presiden yang sudah dipilih, seorang perdana menteri yang diangkat oleh presiden, dan sebuah sistem kabinet konvensional. Mayoritas orang di majelis menerima proposal itu. Tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya yang pertama serta Ismet Inonu sebagai perdana menterinya yang pertama (Erik J. Zürcher, 2003: 214-215).

Dengan demikian, kekhalifahan telah dipisahkan dari negara dan menjadi semacam lembaga internasional yang kebetulan memiliki markas besar di Turki. Pada dasarnya, Kemal bisa mempertahankan kekhalifahan sebagai alat bagi pengaruh Turki di antara negara muslim, atau memperkuat mandat yang diterimanya dengan legitimasi dari khalifah di samping membebaskan Turki dari implikasi internasional kekhalifahan. Namun, Kemal berpandangan negara modern hanya dapat diwujudkan dengan pemutusan hubungan secara menyeluruh dari lembaga politik dan sosial Islam yang lama. Kemal percaya bahwa negara modern dapat ditopang oleh “agama rakyat”, sehingga yang diperlukan adalah membentuk lembaga baru yang dapat mendorong pertumbuhan agama rakyat dan mengembangkan tanggung jawab individual, tempat agama rakyat itu tumbuh (Siti Maryam, 2002: 160).

Menurut Mustafa Kemal, kemunduran-kemunduran Turki Utsmani disebabkan karena tidak beresnya sistem kekhalifahan. Oleh karena itu, sistem

tersebut harus dihapuskan kalau Turki ingin maju sebagaimana negara Eropa lainnya. Karena pertimbangan itu, Mustafa Kemal menghapuskan jabatan Khalifah. Sejak itu, imperium Turki Utsmani berakhir dan sejarah Turki memasuki era modern (K. Ali, 2003: 564).

b. Luar Negeri

Politik luar negeri Republik Turki sepanjang periode 1923-1945 bisa dikatakan hati-hati, realistis, dan pada umumnya bertujuan untuk mempertahankan kemenangan yang diraih di tahun 1923. Sampai akhir 1920-an, hubungannya dengan negara-negara demokrasi Eropa Barat terhambat sebagai akibat dari perjanjian Lausanne, di mana sebagian masalah tidak dapat diselesaikan. Yang terpenting adalah perselisihan dengan Inggris mengenai Mosul, sebuah propinsi kaya minyak yang sebagian besar dihuni oleh rakyat Kurdi. Mosul diduduki tentara Inggris setelah gencatan senjata tahun 1918, sehingga Turki memasukkannya ke dalam daerah-daerah yang mereka anggap sebagai wilayahnya dalam Pakta Nasional. Dalam perundingan selama 1923 dan 1924, Inggris menegaskan bahwa Mosul termasuk wilayah Irak, dan menolak Turki untuk mengadakan plebisit. Ketika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, masalah itu diserahkan kepada Liga Bangsa-bangsa di Jenewa, yang di masa itu Turki belum menjadi anggotanya. Liga Bangsa-bangsa memulai pembicaraan tentang perkara ini di bulan September 1924. Setahun kemudian, September 1925, sebuah komisi Liga Bangsa-bangsa menyelidiki situasi langsung di tempat itu dan menyatakan bahwa Mosul termasuk wilayah Irak.

Turki menghadapi masalah utama tentang pembayaran utang negara Turki Utsmani dengan Perancis. Perancis merupakan investor terbesar sebelum perang. Pada tahun 1928 ditetapkan bahwa Turki menanggung beban pembayaran itu. Namun, krisis ekonomi dunia mengakibatkan tertundanya pembayaran itu di tahun 1930. Setelah melakukan negosiasi-negosiasi panjang, pada tahun 1933 utang itu dijadwalkan kembali dengan syarat-syarat pembayaran yang lebih ringan bagi Turki.

Selain perselisihan-perselisihan diplomatis, pada tahun-tahun pertama setelah Perjanjian Lausanne terjadi perselisihan berkepanjangan antara Turki

dengan negara-negara besar lainnya. Turki menegaskan ingin memiliki hak-hak kedaulatan sepenuhnya. Sementara Perancis dan Inggris tampak mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka peroleh selama rezim kapitulasi. Terjadi pula perselisihan mengenai penolakan negara-negara Eropa untuk memindahkan mereka di Ankara. Terdapat pula perselisihan mengenai departemen Pendidikan Turki terhadap sekolah-sekolah misi Kristen. Selain itu, terdapat pula perselisihan mengenai tingkat independensi Komisi Teluk Internasional yang ditetapkan di Lausanne untuk mengawasi pelayaran melalui Bosphorus dan Dardanela. Terdapat pula masalah tentang gereja Ortodoks di Istanbul. Semua masalah itu akhirnya dapat diselesaikan dan memuaskan Turki.

Akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an menunjukkan adanya peningkatan terhadap hubungan Turki dengan tetangga-tetangganya. Perjanjian untuk tidak saling menyerang ditandatangani dengan Italia tahun 1928. Diadakan pula rekonsiliasi dengan Yunani pada Oktober 1930. Setelah diadakannya sejumlah konferensi di Balkan, sebuah Pakta Balkan ditandatangani pada 1934 dengan Yunani, Yugoslavia, Rumania, dan Turki sebagai anggotanya. Pada tahun 1937, penegasan hubungan Turki dengan negara-negara tetangganya di timur, Irak, Iran, dan Afganistan disepakati dalam Perjanjian Sababad (Erik J. Zürcher, 2003: 261-262).

Sepanjang periode setelah perang kemerdekaan, ketika ketidakpercayaan terhadap barat masih kuat, pangkal kekuatan politik luar negeri Turki terletak pada upaya mempertahankan hubungan baik dengan Uni Soviet. Pada tahun 1930-an hubungan dengan Uni Soviet tetap baik, tetapi di masa itu hubungan dengan Uni Soviet bukan merupakan satu-satunya pilar politik luar negeri Turki. Selain pendekatan kembali dengan tetangga-tetangganya, hubungan Turki dengan negara-negara barat pun membaik lagi. Pangkal terjadinya pemulihan hubungan baik itu terletak pada fakta bahwa, bersama Perancis dan Inggris, Turki secara tegas mendukung status quo dan menolak aspirasi-aspirasi negara revisionis seperti Nazi Jerman dan Fasis Italia, yang berkeinginan untuk menguasai Eropa. Meskipun demikian, Turki memelihara hubungan baik dengan Jerman. Namun di Mediterania Timur, Turki memandang ekspansionisme Italia sebagai satu

ancaman besar. Sahabat Turki, Uni Soviet, juga mendukung sikap anti-kubu revisionis dan memfasilitasi pendekatan kembali Turki dengan Barat.

Turki menjadi anggota Liga Bangsa-bangsa pada tahun 1932. Pada bulan April 1936, Turki mengirimkan sebuah memo kepada para penanda tangan Perjanjian Lausanne. Turki meminta diadakannya demiliterisasi selat-selat. Permintaan itu mendapat sambutan baik. Kemudian, diadakan konferensi di Motreux dan dalam perjanjian yang dihasilkan dinyatakan bahwa Turki memperoleh kembali kekuasaan penuh atas selat-selat itu dan Komisi Selat dihapuskan. Semua pihak menerima sejumlah pembatasan bagi pelayaran kapal perang melalui selat-selat itu, tetapi lalu lintas perdagangan tetap bebas bagi negara-negara yang tidak berperang dengan Turki (Erik J. Zürcher, 2003: 263-264).

2. Dampak Sosial-Budaya

Mustafa Kemal diangkat sebagai Presiden Turki yang pertama. Di bawah Kemal, banyak perubahan yang dilakukan, termasuk penghapusan jabatan Kekhalifahan sebagai jabatan politik. Selain itu, terdapat pembaruan-pembaruan yang selanjutnya berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Turki. Pembaruan itu disebut pembaruan Kemalis atau reformasi Kemalis. Pembaruan Kemalis merupakan penerapan adaptasi dalam bentuk westernisasi sekuler (Mesut Yegen, 1999:559). Program itu tidak menolak Islam atau menentang agama. Agama hanya diturunkan peranannya menjadi nilai personal. Pembaruan Kemalis berusaha untuk menciptakan bentuk Islam individualistik modern. Pembaruan Kemalis dilaksanakan di atas enam prinsip dasar yang menjadi filsafat politik dan dasar Republik Turki. Keenam prinsip dasar atau yang sering disebut “Nilai Kemalis”. Nilai Kemalis itu adalah: (1) Republikanisme, kedaulatan dan otoritas politik berdasar keinginan penduduk; (2) Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan ras tetapi berdasarkan kewarganegaraan yang sama dan mengabdikan kepada cita-cita nasional; (3) Populisme, kesamaan dalam hukum, menolak kepentingan atau persengketaan kelas, dan penyalahgunaan kapitalisme; (4) Etatisme, menerima campur tangan negara yang bersifat membangun perekonomian rakyat;

(5) Sekularisme, menetapkan pemisahan agama dan negara; (6) Revolusionisme, menerima transformasi secara permanen (Siti Maryam, 2002: 160-161).

Pada bulan April 1924, sebulan sesudah dihapuskannya kekhalifahan Majelis Agung Nasional menghapuskan pengadilan *ser'i* (syariah) dan membubarkan Kementerian Urusan Agama dan Kesalehan. Lembaga pendidikan *medrese* dibubarkan secara bertahap dengan pemberlakuan Undang-undang tentang Penyatuan Pendidikan, yang membuat seluruh pendidikan menjadi sekuler. Namun, pemerintah masih mengawasi sistem sumbangan Islam (*evkaf*) dan masjid-masjid karena pemerintah menganggap agama merupakan kekuatan yang terlalu penting dan berbahaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang “fanatik”.

Pada bulan Desember 1925, giliran tarekat dilarang. Kode hukum sipil syariah dihapuskan Februari 1926. Puncaknya, amendemen tahun 1928 mencoret kata “agama negara Turki adalah Islam” dalam konstitusi. *Laisisme* atau sekularisme ditulis dalam konstitusi tahun 1937, sebagai dasar negara yang fundamental bersama lima nilai lainnya. Bentuk lain dari sekularisasi adalah “nasionalisme Islam”. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menjadikan Islam lebih men-Turki, sehingga semua orang dapat memahaminya tanpa harus bersandar kepada penafsir profesional. Azan dan Khutbah Jumat dalam bahasa Turki dimulai pemakaiannya tahun 1932. bahkan keputusan pemerintah tahun 1933, menyatakan azan dalam bahasa Arab sebagai suatu pelanggaran. Pembaruan penting lainnya adalah mengganti tulisan Arab dengan tulisan latin. Pada tanggal 17 Februari 1926, majelis menetapkan Undang-undang Sipil Turki. Isi dari undang-undang tersebut di antaranya melarang poligami, perceraian sepihak, kebebasan perempuan bekerja di kantor-kantor, dan kebebasan perempuan menduduki jabatan di bidang ekonomi dan intelektual. Undang-undang sipil tersebut mulai efektif berlaku tanggal 4 Oktober 1926 (Siti Maryam, 2002: 161-163).

Pembaruan lain yang merupakan mata rantai kebijakan sekularisasi ialah seperangkat aturan publik dan administrasi. Seperangkat aturan itu antara lain mewajibkan pegawai negeri berpakaian ala Barat dan kopiah, semua laki-laki

harus menggunakan kopiah dan pemakaian sorban merupakan pelanggaran kriminal, serta penggunaan penanggalan Gregorian secara resmi dan bukan lagi penanggalan hijriah (A. Mukti Ali, 1994: 86).

3. Dampak Ekonomi

Turki pada tahun 1923, sebagai negara yang baru saja selesai berperang mengalami masa sulit dalam bidang ekonomi. Kerusakan fisik yang ditimbulkan akibat perang, di antaranya adalah kerusakan di sejumlah kecil instalasi industrial, yang kebanyakan ada di wilayah Istanbul, jalur kereta api dan jembatan-jembatan di Anatolia barat, serta perumahan di kota Izmir. Salah satu isi dari perjanjian Lausanne adalah pertukaran penduduk dari Turki ke Yunani ataupun sebaliknya telah mengakibatkan adanya gelombang emigrasi. Emigrasi warga Yunani dan Armenia menyebabkan eksodusnya mayoritas pengusaha dan manajer. Bersama mereka, lenyap pula stok tenaga terampil di bidang industrial dan komersial.

Perdagangan internasional Turki tahun 1923 adalah sepertiga dari neraca sepuluh tahun sebelumnya. Sektor pertanian, sebagai sektor perekonomian terpenting Turki pulih relatif cepat tahun 1923. Namun, pemulihan ekonomi Turki secara keseluruhan membutuhkan waktu sampai tahun 1930 untuk mencapai level seperti pada masa pra-perang. Di samping itu, Turki juga mempunyai tanggungan utang yang berat akibat perang.

Seperti para peserta perang lainnya, pemerintah Utsmani menanggung beban utang yang sangat berat. Namun, utang Utsmani bukan kepada Amerika Serikat sebagai pemenang, tetapi kepada Jerman, negara yang kalah. Di Lausanne, utang ini dibagi-bagikan secara adil kepada negara-negara atau wilayah-wilayah penerus kerajaan Utsmani dan 65 persen dari utang itu harus ditanggung oleh Turki dan harus dibayar dalam waktu bertahun-tahun (Erik J. Zürcher, 2003: 212-213).

Perjanjian Lausanne telah membuat negara Turki berdaulat. Kedaulatan tersebut termasuk kedaulatan dalam bidang ekonomi. Itu berarti Turki mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Salah satu prinsip dasar dari enam prinsip dasar negara Turki atau “Nilai Kemalis” yang

berhubungan dengan bidang perekonomian adalah etatisme. Itu berarti menerima campur tangan negara dalam membangun perekonomian rakyat. Turki menggunakan sistem etatisme karena mendapat inspirasi dari ekonomi Rusia. Pengaruh Rusia di Turki adalah cukup aktif pada tahun-tahun permulaan rezim Kemalis, karena hubungan yang baik dan persahabatan antara kaum Bolshevik dan kaum nasionalis Turki pada waktu kedua rezim itu berjuang melawan imperialisme Barat (A. Mukti Ali, 1994: 88-89)

Pemerintahan Kemal berhasil mengatasi defisit anggaran negara melalui pembaruan sistem perpajakan dan membuat aturan keuangan publik. Seiring dengan pembaruan soal keuangan, tahun 1930-an berdasarkan prinsip etatisme pemerintah melakukan monopoli di sektor industri, mendirikan perusahaan baru, baik nasional maupun multi-nasional. Meskipun tidak memaksakan nasionalisasi, pemerintah membeli perusahaan-perusahaan asing, kebanyakan di sektor transportasi kereta api. Pada sektor ketenagakerjaan, Penghapusan unsur Armenia dan Yunani memberi peluang bagi munculnya tenaga kerja pribumi yang terampil. Guna mendorong orang-orang Turki berada di luar negeri agar kembali menetap di Turki, Majelis mengeluarkan Undang undang Imigrasi tahun 1934 dan Undang-undang perburuhan disahkan tahun 1936 (Siti Maryam, 2002: 163).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Perang Dunia I, yang dimulai pada tahun 1914, adalah akibat dari imperialisme modern, yang menimbulkan persaingan antara negara-negara industri, seperti Inggris dan Jerman. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya persaingan tersebut terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) ekonomi; (b) politik dan nasionalisme; (c) kemiliteran; (d) sosial; (e) diplomatik. Dalam persaingan itu, negara-negara industri tersebut mencari kawan dari negara lain yang dapat diajak bekerjasama dalam hal ekonomi, politik, maupun militer. Sehingga, muncul kelompok-kelompok dari negara-negara yang bersekutu tersebut. Kelompok-kelompok negara-negara Eropa yang terbagi, yaitu: (a) *Triple Entente* (Inggris, Prancis, dan Rusia); (b) *Triple Alliance* (Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia). Posisi Turki berada pada pihak Jerman. Dalam perang tersebut, Turki mengalami kekalahan. Wilayah Turki terpecah akibat perjanjian pembagian pada masa perang. Kemudian, dilaksanakan Perundingan di Paris dan San Remo oleh Sekutu yang kemudian diputuskan akan melakukan perundingan dengan Turki yang akan dilaksanakan di Sevres. Perundingan menghasilkan Perjanjian Sevres yang ditandatangani pada 10 Agustus 1920. Hasil dari perjanjian itu mengakibatkan berkurangnya kedaulatan Turki. Di sisi lain, kaum nasionalis Turki berkembang pesat. Gerakan ini melahirkan Pakta Nasional yang merupakan tuntutan Turki terhadap sekutu atas hak-haknya. Kaum Nasionalis Turki menolak perjanjian Sevres. Atas penolakan tersebut, Sekutu kemudian menyerang Turki dan mengakibatkan terjadinya Perang Kemerdekaan Turki yang terjadi 1921 hingga tahun 1922. Turki memenangkan perang itu. Sekutu kemudian mengajak Turki

untuk berunding. Perundingan dilaksanakan di Lausanne, Swiss. Perundingan itu melahirkan Perjanjian Lausanne yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923.

2. Perjanjian Lausanne setidaknya telah mewujudkan tujuan dari Pakta Nasional. Turki telah memperoleh kembali wilayah-wilayah yang diinginkannya. Perjanjian Lausanne merupakan kemenangan Turki atas Eropa. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, negara nasional Turki mendapat pengakuan internasional.
3. Perjanjian Lausanne berdampak luas bagi bangsa Turki. Perjanjian Lausanne telah membuat negara Turki berdaulat. Setelah perjanjian itu, Republik Turki memproklamasikan kemerdekaannya dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Pada tahun 1924, Kekhalifahan dihapuskan. Hubungan yang baik dengan negara-negara barat maupun negara-negara tetangga yang merupakan lawan pada masa perang dijalin kembali. Di bawah pemerintahan Kemal, dilakukan pembaruan-pembaruan di Turki. Pembaruan itu disebut Reformasi Kemalis. Salah satu dari Reformasi Kemalis adalah sekularisme, sehingga kehidupan bernegara tidak dicampur dengan agama. Dalam melaksanakan sistem sekularisme, Majelis Agung Turki menetapkan Undang-Undang Sipil Turki, Undang-undang tersebut antara lain berisi tentang kebebasan perempuan, penggunaan kalender Gregorian yang menggantikan sistem kalender Hijriah, pelarangan poligami, dan lain sebagainya. Kedaulatan yang diperoleh Turki juga meliputi bidang ekonomi. Itu berarti Turki mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Di bidang ekonomi, Turki menerapkan sistem etatisme. Sistem ini diambil dari Rusia. Karena menggunakan sistem etatisme, berarti menerima campur tangan negara atau pemerintah dalam membangun perekonomian rakyat. Salah satu keberhasilan pemerintahan Kemal dalam bidang ekonomi adalah berhasil mengatasi defisit anggaran negara melalui pembaruan sistem perpajakan dan membuat aturan keuangan publik. Seiring dengan pembaruan soal keuangan, tahun 1930-an berdasarkan

prinsip etatisme pemerintah melakukan monopoli di sektor industri, mendirikan perusahaan baru, baik nasional maupun multi-nasional.

B. Implikasi

Seiring dengan kemunculan imperialisme, negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mempunyai keinginan untuk menguasai daerah lain. Tujuannya untuk memasarkan hasil industrinya akibat dari revolusi industri. Salah satu wilayah yang diperebutkan adalah Turki. Negara-negara Imperialis tersebut bersaing untuk memperluas daerah imperium mereka. Puncak persaingan antara bangsa-bangsa tersebut menyebabkan Perang Dunia I. Ada keterlibatan Turki dalam perang tersebut. Setelah Perang Dunia I berakhir, Turki kehilangan banyak wilayah dan kedaulatannya dibatasi. Hal itu menyebabkan semangat nasionalisme Turki tumbuh untuk melawan negara-negara imperialis yang merebut wilayah mereka. Golongan nasionalis terus berkembang menjadi kekuatan besar. Dalam Perang Kemerdekaan melawan Inggris, Prancis, dan Yunani, Turki berhasil memenangkannya. Kemudian terjadi perundingan antara kedua belah pihak di Lausanne, Swiss. Hasil perundingan melahirkan sebuah perjanjian yang mengakibatkan kembalinya kedaulatan Turki.

Perjanjian Lausanne 1923 mengantarkan Turki memperoleh kedaulatannya. Turki dapat mengatur sendiri urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak lain. Kedaulatan Turki ditegakkan melalui Pemerintahan Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal melakukan banyak pembaruan bagi negara Turki. Perubahan-perubahan mencakup bidang politik, sosial-budaya, maupun ekonomi. Namun, ada dugaan bahwa kesepakatan Turki dengan Sekutu tercapai karena Turki menerima tuntutan negara-negara Barat tersebut untuk mengikuti jalan pemikiran mereka sebagai negara Barat dan meninggalkan pemikiran Islam, agama yang sebelumnya merupakan identitas bagi Turki.

Dalam bidang politik, perubahan yang mendasar yang dilakukan adalah penghapusan kekhalifahan. Hal itu merupakan kemenangan bangsa-bangsa Barat terhadap Islam. Penghapusan kekhalifahan itu berdampak pada perubahan bentuk

negara. Dari yang semula negara kerajaan berubah bentuk menjadi negara republik dengan kepala negaranya adalah presiden. Penghapusan itu juga mengakibatkan berakhirnya kekhalifahan Islam. Dengan berakhirnya kekhalifahan Islam di Turki, umat Islam di dunia tidak lagi bersatu dalam suatu wadah kepemimpinan. Hal itu tentunya tidak hanya berdampak bagi Turki, tetapi juga bagi dunia, khususnya dunia Islam. Di bidang politik luar negeri, hubungan politik Turki dengan negara lain yang pernah berlawanan diperbaiki. Turki kemudian bergabung menjadi anggota Liga Bangsa-bangsa. Hal itu menegaskan bahwa Turki adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan diakui oleh dunia internasional.

Perubahan pada bidang sosial-budaya berkaitan dengan salah satu dari enam hal yang terdapat dalam “Nilai Kemalis”, yaitu sekularisme. Penerapan sekularisme ini berarti pemisahan yang jelas antara negara dengan agama. Negara tidak boleh mencampuri urusan agama, begitu juga sebaliknya. Dalam melaksanakan sistem sekularisme, Majelis Agung Turki menetapkan Undang-Undang Sipil. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai kebebasan perempuan, penanggalan Gregorian, dan pelarangan poligami. Ada pula aturan lain yang mengatur tentang pelarangan azan dengan bahasa Arab. Aturan-aturan tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan merupakan hal baru dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat Turki. Pelaksanaan aturan-aturan itu telah mengubah gaya hidup masyarakat Turki. Kehidupan orang-orang Turki menjadi lebih modern dan mengikuti gaya hidup dan cara pandang Barat. Pandangan ini biasa disebut dengan Islam liberalis karena dipengaruhi oleh pemikiran liberal. Pandangan tersebut melahirkan versi modern dari Islam yang didasarkan dari nasionalisme, filsafat, dan sains. Islam liberal tersebut mempunyai filsafat sendiri yang dinamis dan tidak menentang sains dan akal. Gaya hidup dan cara pandang tersebut dianggap oleh Kemal sebagai suatu keharusan yang dapat membawa Turki ke arah yang lebih baik.

Di bidang ekonomi, Pemerintah Kemal menempuh jalan Etatisme. Sistem ini dipilih supaya pemerintah dapat secepatnya memulihkan ekonomi Turki setelah perang. Dengan mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi, pemerintah

dapat mendorong supaya perekonomian rakyat dapat terbangun dengan baik. Dengan keberhasilan membangun ekonomi rakyat, perekonomian Turki dapat pulih.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti lain

Kepada peneliti lain, khususnya mahasiswa sejarah yang tertarik dalam menulis tentang sejarah Turki, disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah Turki karena masih banyak tema penelitian yang belum diteliti berkaitan dengan permasalahan di Turki. Permasalahan-permasalahan tersebut misalnya: Turki setelah Perang Dunia II, keterlibatan Turki dalam Perang Balkan, Pembaharuan Kemalis dan dampaknya terhadap masyarakat Turki, atau perjuangan Suku Kurdi di Turki.

2. Bagi Generasi Muda

Peneliti berharap kepada generasi muda agar dapat mengambil hikmah dari pengakuan kedaulatan Turki yang diperoleh dari Perjanjian Lausanne 1923. Hikmah yang dapat diambil adalah semangat nasionalisme. Perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan atau kedaulatan didasari dari rasa nasionalisme yang tinggi. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi, bangsa Turki berjuang dengan gigih dalam melawan imperialisme. Perjuangan tersebut juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya generasi muda memiliki rasa dan semangat nasionalisme yang tinggi. Untuk masa sekarang, nasionalisme hendaknya dituangkan dalam aksi atau tindakan yang positif dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Namun, perlu disadari bahwa identitas atau jati diri bangsa perlu dipertahankan. Turki telah berhasil memperoleh kemerdekaan tetapi kemudian meninggalkan kebudayaan Islam yang telah mengakar kuat di Turki selama berabad-abad. Terlepas dari adanya dugaan tentang tekanan dari Sekutu, Turki kemudian menerima pemikiran-pemikiran Barat. Pemikiran Barat dianggap sebagai satu-

satunya jalan untuk kemajuan. Pem-Barat-an atau yang biasa disebut dengan Westernisasi pada masa ini terus berkembang seiring dengan globalisasi. Perlu diingat bahwa Barat bukan satu-satunya peradapan yang dapat mewujudkan kemajuan. Selain itu, tidak semua hal-hal yang berbau barat itu positif. Jadi, westernisasi perlu disaring dengan nilai-nilai luhur jati diri bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, sudah selayaknya kita kembali pada Pancasila sebagai jati diri bangsa. Selain itu, perlu diingat pula bahwa agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan. Agama memberi nilai-nilai yang baik bagi kehidupan dan dapat pula menjadi filter bagi westernisasi. Untuk itu, ajaran agama perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan cara yang benar. Agama tidak menghambat kemajuan, tetapi justru mengarahkan kemajuan itu ke arah yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali.
- Ali, K. 2003. *Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Dinasti Utsmani (Tarikh pramodern)*. Terjemahan Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Mukti Ali. 1994. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan.
- Cahyo Budi Utomo. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- C.S.T. Kansil dan Julianto. 1986. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Bangsa*. Jakarta: Erlangga.
- Dahlan Nasution. 1984. *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung: Remadja Karya.
- Djokosutono. 1958. *Ilmu Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie. 1988. *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*; Penerjemah Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadari Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamka. 1975. *Sejarah Umat Islam. Jilid 3*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Helius Sjamsudin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- _____ dan Ismaun. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Binacipta.

- Kartini Kartono.1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung. Bandar Maju.
- Koentjaraningrat (Editor). 1986. *Metode Penelitian-Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kohn, Hans. 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarah*. Jakarta : Airlangga.
- Lenczowski, George. 1993. *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*. Terjemahan Asgar Bixby. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Leo Agung . 2002. *Sejarah Intelektual*. Salatiga: Widyasari Press.
- Miriam Budiardjo. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Morgenthau, Hans J. 1991. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho Notosusanto. 1971. *Norma-Norma Penelitian Dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI-Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- _____. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Renner, G. J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sidi Gazalba. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Siti Maryam (Editor). 2002. *Sejarah Peradaban Islam. Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Smith, Anthony D. 2003. *Nasionalisme Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Stoddard, L. 1966. *Dunia Baru Islam*. Jakarta : Panitia.

Suharyata Hardjasatoto. 1983. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sutarjo Adisusilo. 2006. *Nasionalisme di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Wallace, Rebecca M. 1993. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Zurcher, Erik J. 2003. *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Internet

Arkanda. *Pengertian Imperialisme*.
<http://arkandas.wordpress.com/2008/10/21/sejarah-penjajahan-di-indonesia/>.
Diakses tanggal 1 Juli 2009.

Kelik Pramudya. *Kedaulatan Negara*.
<http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/teori-kedaulatan.html>. Diakses
tanggal 1 Juli 2009.

Soebantardjo. *Sari Sedjarah Jilid I: Asia-Afrika*. BOPKRI, Yogyakarta, 1960.
<http://www.wikipedia.wiki/imperialisme>. Diakses tanggal 1 Juli 2009.

Jurnal

Prior, Robin dan Trevor Wilson. *Review Article The First World War* dalam
Journal of Contemporary History. 2000. 35 (2).SAGE Publication. 319-328.

Yegen, Mesut. *The Kurdish Question in Turkish State Discourse* dalam *Journal of Contemporary History*. 1999. 34 (4). SAGE Publications. 555-568.

